



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2016-2021

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PALANGKA RAYA
TAHUN 2017**



1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Renstra SKPD merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi SKPD serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan

peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana

Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan khususnya urusan perdagangan dan industri.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Perdagangan dan Industri di Kalimantan Tengah dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan pilihan bidang perdagangan dan industri, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang perdagangan dan industri di Kalimantan Tengah 2016-2021 dan tantangan serta peluang pelayanan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,dan Kebijakan

Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang Perdagangan dan Industri yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VI memuat indikator kinerja pembangunan perdagangan dan industri yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam kaidah pelaksanaan.

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Tugas Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan dan perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang perdagangan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan

- b. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kreatif, industri agro dan kimia, industri logam, mesin, elektronika dan aneka
- c. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan koordinasi industri makanan, minuman dan kemasan
- e. Pembinaan dan koordinasi pasar rakyat dan pasar modern
- f. Pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan tertib niaga
- g. Pembinaan dan pengendalian izin industri dan perdagangan
- h. Pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan luar negeri
- i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian
- j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2.1.3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin kawasan industri lokasi lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan;
- c. Penetapan bidang industri prioritas skala provinsi;
- d. Penyediaan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam bidang industri dan perdagangan;
- e. Pengelolaan laboratorium kemetrologian;
- f. Pengelolaan laboratorium pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- g. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro bidang industri dan perdagangan;
- h. Pelatihan SDM pengusaha dan aparat pembina industri dan perdagangan;
- i. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di provinsi;
- j. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
- k. Penyusunan rencana jangka panjang dan tata ruang industri provinsi dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana

(jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah industri) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional;

- l. Pengalokasian sumber daya manusia potensial bidang industri dan perdagangan;
- m. Penelitian yang mencakup wilayah provinsi;
- n. Perencanaan kawasan industri dan perdagangan;
- o. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Provinsi;
- p. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- q. Promosi produk industri provinsi;
- r. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan wilayah provinsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, struktur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta aset perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi:

- 1. Penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- 2. Penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran dinas;
- 3. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan dinas;

4. Pengolahan, meneliti dan mempelajari bahan dan data penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
5. Penyusunan rencana anggaran;
6. Pelaksanaan urusan pengelolaan urusan keuangan;
7. Mempersiapkan dan membuat SPP;
8. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap Bendahara;
9. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan;
10. Penyelenggaraan pelaporan dan kehumasan;
11. Penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga;
12. Penyelenggaraan urusan protokol dan hubungan masyarakat;
13. Penyelenggaraan urusan hukum dan perundang-undangan;
14. Penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
15. Pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
16. Pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang;
17. Penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
18. Perencanaan dan mempersiapkan usulan pengikutsertaan dalam Latihan Pra Jabatan bagi Calon pegawai, ujian dinas, Diklat Penjenjangan, Teknis maupun Fungsional;
19. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;
20. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data kepegawaian; dan
21. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

b. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana prasana distribusi perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis usaha Perdagangan Dalam Negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian distribusi, pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
2. Pembinaan pelaku usaha distribusi;
3. Pembinaan dan pemasaran produk hasil industri pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan;
4. Pengendalian inflasi;
5. Pelaksanaan kerjasama dagang antar pulau, pengembangan dan pengawasan sarana prasarana distribusi perdagangan;
6. Pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan pasar rakyat, pasar modern dan pergudangan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana distribusi;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam upaya pengembangan, pengelolaan sarana prasarana distribusi;
9. Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha;
10. Penyelenggaraan promosi dan peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil dan menengah perdagangan;
11. Pengawasan transaksi perdagangan melalui elektronik dan;
12. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh Seksi Barang Pokok, Barang Penting dan Distribusi, Seksi Sarana, Prasarana Distribusi dan Logistik dan Seksi Bina Usaha, Pemasaran dan Promosi Produk Dalam Negeri.

c. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas bimbingan teknis pembinaan ekspor, pengembangan dan pemantauan komoditi ekspor, evaluasi kegiatan ekspor impor, penyediaan dan penyebaran informasi perdagangan internasional, promosi dagang serta pembinaan perizinan dan non perizinan di bidang ekspor impor.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan masukan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan, pembinaan pengembangan komoditi ekspor;

2. Penyiapan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan informasi perdagangan luar negeri dalam rangka pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama/kemitraan dunia usaha perdagangan luar negeri; dan
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan promosi dagang di luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh Seksi Ekspor Impor, Seksi Fasilitasi dan Kerjasama dan Seksi Pengembangan dan Promosi Komoditi Ekspor

d. Bidang Perlindungan Konsumen

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas Perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha, pemberian pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Barang Beredar dan Tertib Niaga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan untuk bimbingan teknis penyuluhan konsumen dan pengawasan terhadap Barang Beredar dan Tertib Niaga;
2. Pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
3. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan tertib niaga, barang dan jasa;
4. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan konsumen terhadap dan pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga;
5. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ dan PPNS-PK;
6. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Provinsi;
7. Pelaksanaan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
8. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi;
9. Pengoordinasian pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN Provinsi;

10. Pengoordinasian pembentukan BPSK dengan kabupaten/ kota di wilayah Provinsi;
11. Pengoordinasian kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi;
12. Pengoordinasian pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi;
13. Pengoordinasian pembentukan BPSK dengan kabupaten/ kota di wilayah provinsi;
14. Pengoordinasian kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi; dan
15. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perlindungan Konsumen dibantu oleh Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Tertib Niaga, Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Seksi Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

e. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri daerah dan sumber daya industri, penyebaran dan pemerataan industri serta kebijakan industri daerah dalam melaksanakan pemberdayaan, pembinaan perizinan, promosi industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, penumbuhan wirausaha, pengembangan industri dan fasilitasi industri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Industri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri daerah , kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pembinaan perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi

industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri;

4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil , industri menengah dan industri besar;
5. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri kecil , industri menengah dan industri besar.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Industri dibantu oleh Seksi Industri Kreatif, Seksi Industri Agro dan Kimia dan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.

f. UPTD BPSMB

Tugas Pokok Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Palangka Raya adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan jasa teknis kepada dunia usaha & masyarakat di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
2. Melaksanakan penyusunan tata kerja pengujian dan sertifikasi.
3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan pengawasan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang.
4. Pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana laboratorium.
5. Melaksanakan koordinasi baik pengendalian kegiatan pengujian dan sertifikasi mutu barang, maupun sesama Anggota Sistem Jaringan Laboratorium Penguji Mutu.
6. Penerimaan dan penyetoran retribusi atas hasil pelayanan jasa teknis pengujian mutu barang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

g. UPTD Metrologi

Tugas pokok UPTD Metrologi adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang Kemetrologian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Balai Metrologi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis kemetrologian;
2. Pembinaan dan pengendalian teknis, pemberian bimbingan dan pengarahan di bidang kemetrologian
3. Pelaksanaan pengelolaan standar
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pengawasan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Pos Ukur Ulang dan PPNS – Metrologi serta melaksanakan penyuluhan.

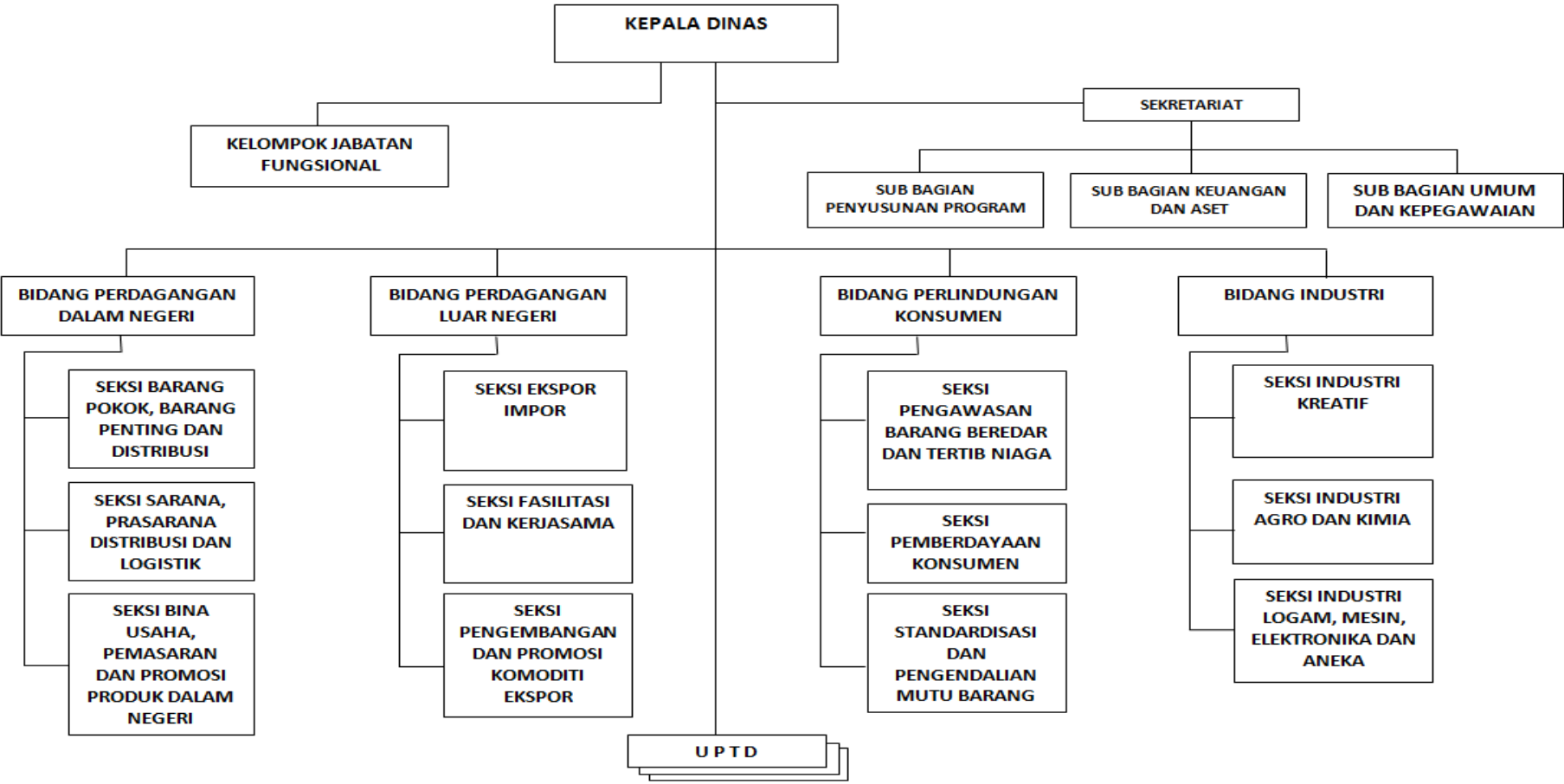
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Balai Metrologi dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

2.1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.2. Sumber Daya DISDAGPERIN Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah terdata sejumlah 122 pegawai negeri yang terdiri dari 78 pegawai laki-laki dan 44 pegawai perempuan.

Tabel 2.1

Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2015

NO	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I A	-
	Golongan I B	-
	Golongan I D	-
2	Golongan II A	3 orang
	Golongan II B	3 orang
	Golongan II C	1 orang
	Golongan II D	4 orang
3	Golongan III A	14 orang
	Golongan III B	35 orang
	Golongan III C	14 orang
	Golongan III D	26 orang
4	Golongan IV A	6 orang
	Golongan IV B	13 orang
	Golongan IV C	3 orang
	Golongan IV D	-
Jumlah		122 orang

Sumber:Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah

2.2.1 Pelaksanaan APBD tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mendapat Anggaran sebesar Rp. 26.736.782.224,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 25.643.735.768,- atau (95,91%), sehingga terdapat efisiensi sebanyak Rp. 1.093.046.456,- atau 4,08 persen. Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebanyak Rp 11.086.506.270 (97,11%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 11.416.032.224,- sedangkan Belanja Langsung dari anggaran yang ada

sebanyak Rp 15.320.750.000,- direalisasikan sebesar Rp 14.557.229.498,- (95,02%).

Tabel 2.2
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja APBD Tahun 2015

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi		SILPA	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Tidak Langsung	11.416.032.224	11.086.506.270	97,11	329.525.954	2,88
Belanja Langsung	15.320.750.000	14.557.229.498	95,02	763.520.502	4,98
Jumlah Belanja	26.736.782.224	25.643.735.768	95,91	1.093.046.456	4,08

Dilihat dari tabel 2.2 mengenai realisasi pelaksanaan anggaran belanja APBD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan atau SILPA jumlah belanja tahun 2015 sebesar Rp1.093.046.456,- (4,08%) secara umum karena jumlah belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung.

Tabel 2.3
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2010-2015

NO	SKPD	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	KET
1.	Dinas Perindag Prov. Kalteng				
	TA. 2010	5.744.099.000,00	5.540.524.321,00	96,46	
	TA. 2011	5.812.340.000,00	5.614.811.100,00	96,60	
	TA. 2012	12.239.751.000,00	11.505.110.785,00	94,00	
	TA. 2013	14.090.000.000,00	13.483.743.716,00	95,70	
	TA. 2014	13.764.000.000,00	13.364.424.411,00	97,10	
	TA.2015	15.320.750.000,00	14.557.229.498,00	95,02	

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2010 hingga tahun 2015 menunjukkan angka yang fluktuatif.

Tabel 2.4

Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2010-2015

Tahun	SKPD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2010	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	222.000.000,00	176.985.700,00	79,72
2011	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	222.000.000,00	226.516.050,00	102,03
2012	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	227.000.000,00	239.017.500,00	105,29
2013	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	276.000.000,00	276.047.300,00	100,01
2014	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	317.400.000,00	320.727.800,00	101,04
2015	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	365.000.000,00	426.136.950,00	116,74

Penerimaan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi. Penerimaan asli daerah merupakan salah satu pilar kemandirian daerah. Penerimaan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun terakhir besarnya selalu meningkat, artinya Disperindag. Provinsi Kalimantan Tengah sudah dapat memaksimalkan kemampuannya dan mencerminkan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. PAD tersebut yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Di tahun 2011, 2012, dan 2013,2014 dan 2015 realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Disperindag Provinsi Kalimantan Tengah selalu melebihi target, tetapi berbeda di tahun 2010, realisasi Penerimaan Asli Daerah belum memenuhi target yang diharapkan seperti dilihat di tabel 2.4 diatas.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang perdagangan dan perindustrian di Provinsi Kalimantan Tengah.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah selama lima tahun kedepan adalah:

2.3.1 Tantangan

Tantangan merupakan segala aspek yang dapat menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh globalisasi;
- b. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas;
- c. Semakin pesatnya perkembangan pusat-pusat perdagangan di Kota yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Meningkatnya produk yang masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah dengan kualitas teknologi yang lebih baik dibandingkan produk lokal;
- e. Tersedianya banyak produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif; dan
- f. Tingginya tingkat persaingan usaha.

2.3.2 Peluang

Peluang merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari potensi/kemampuan. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
- b. Tersedianya potensi usaha;
- c. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
- d. Pangsa pasar yang semakin terbuka; dan
- e. Terbukanya lapangan kerja.

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah

Secara normatif Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien

Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan Kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan ketrampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.

2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perindag perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

3. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya utamanya barang elektronika, mesin dan peralatan listrik serta pakaian

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekpornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk manufaktur yang terus melemah. Di dalam negeri, produk manufaktur seperti elektronika rumah tangga kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memiliki banyak potensi sumber

daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut. Faktor-faktor yang menghambat antara lain:

- a. Rendahnya kualitas produk industri komponen otomotif, elektronika, telematika dan produk aneka.
- b. Peralatan produksi industri komponen otomotif, elektronika, telematika dan produk aneka kurang memadai.
- c. Kurangnya pasokan bahan baku untuk industri

4. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrolagian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di bidang pengawasan, jumlah BPSK masih terbatas, serta tempat pengaduan konsumen masih terbatas.

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar

Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinyu yang menyebabkan keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan sebagai berikut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 39/M-IND/Per/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/Per/2016 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Hal ini akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana layanan teknis dan kondisi mesin yang sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri. Pengadaan sarana dan prasarana harus diikuti dengan pembinaan agar tidak timbul kecurangan yang tidak diinginkan.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah Logam Mesin dan Tekstil

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah pada industri kecil menengah logam mesin dan tekstil. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah logam mesin dan tekstil disebabkan karena tingginya harga bahan baku logam, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM logam mesin dan tekstil.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Agro, Kimia, dan Hasil Hutan.

Industri Agro dan Kimia (Agrokim) dan hasil hutan memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri agro, kimia, dan hasil hutan. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro, kimia, dan hasil hutan. Selain itu, Hilirisasi industri agro, kimia dan hasil hutan dalam rangka peningkatan nilai tambah yang maksimal masih menemui kendala/hambatan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, kenaikan harga energi, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri agro, kimia dan hasil hutan.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalimantan Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah:

KALTENG Maju, Mandiri & Adil Untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Religius Kuat, Amanah dan Harmonis).

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut Tingkat kemajuan diukur berdasarkan indikator kinerja sektor perekonomian, dan sosial. Perekonomian dapat dinilai dari tingkat pendapatan properti sektor industri dan jasa dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja, keterpaduan antar sektor ekonomi, keberlanjutan dan kemiskinan. Kemajuan juga diukur dari indikator kependudukan dan SDM. Tingkat kemandirian suatu daerah tercermin pada kemampuan memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunannya yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak sosial dan perekonomiannya.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

Misi satu : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Hal ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas;

Misi dua : Pengelolaan Infrastruktur

Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas;

Misi tiga : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai

Dengan tujuan Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai ;

Misi empat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan

Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten;

Misi lima : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan tata pemerintahan yang baik;

Misi enam : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata

Hal ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan Meningkatkan peran Sektor Pariwisata;

Misi tujuh : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ;
Misi kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
Hal ini bertujuan meningkatkan Meningkatkan kemandirian pembiayaan
Pembangunan.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi keempat yaitu Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan misi kedelapan yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan misi yang dipakai sebagai amanat untuk Dinas Dagperin Prov. Kalteng karena di dalam misi tersebut menyangkut isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah.

Inti permasalahan di misi keempat dan misi kedelapan ini adalah sebagai berikut:

- Kebijakan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta pengendalian tingkat inflasi di daerah perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Daerah; dan
- Pengelolaan Pendapatan Daerah sangat berpengaruh dalam perekonomian suatu daerah, oleh karena itu perlunya inventarisasi berbagai sumber obyek PAD demi kesejahteraan masyarakat.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup:

- a. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- f. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Jawa Tengah, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

Berdasarkan hasil telaah dari isu strategis nasional (RPJPD dan RPJMN 2015-2019), dan Provinsi sekitarnya maka Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun;
- Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing;
- Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah;
- Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan;
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
- Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi; dan
- Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi, kinerja, dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskanlah visi dan misi. Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Merealisasikan sebuah visi diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Visi tersebut dijabarkan dengan jelas dalam misi, sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

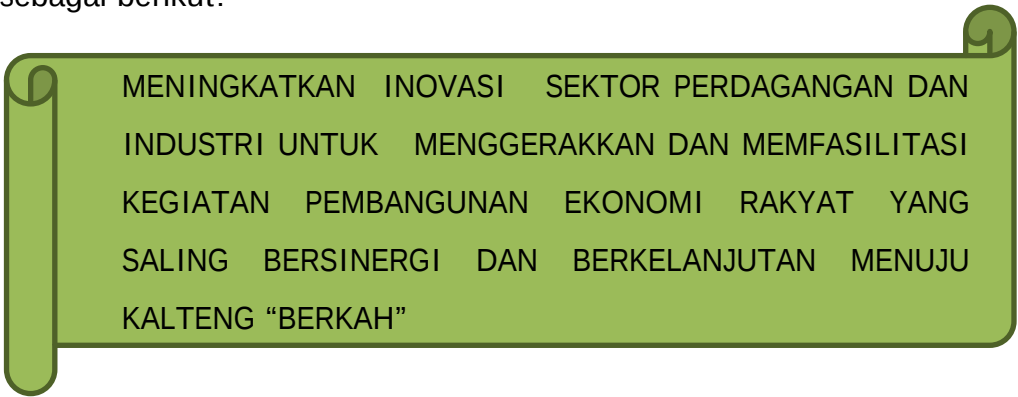
Dalam mencapai visi dan misi dibutuhkan tujuan dan sasaran yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan, dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

4.1. Visi dan Misi Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan dan perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

4.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran umum apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun. Guna menyelaraskan tugas dan fungsi dengan amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, sebagai berikut:



4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menentukan misinya sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan pengembangan sektor industri dan nilai tambah industri;
- 2. Mewujudkan penguatan pangsa pasar.
- 3. Mewujudkan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
- 4. Mewujudkan peningkatan kinerja Ekspor non migas;
- 5. Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, *impact*

harus memberi pengertian sebagai *utimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

4.2.1 Tujuan

1. Meningkatkan daya saing sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan penguatan pangsa pasar
3. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Meningkatkan kinerja ekspor non migas Kalimantan Tengah.
5. Meningkatkan tertib perdagangan

4.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas perdagangan dalam negeri di Kalimantan Tengah.
3. Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng.
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri.
5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan *resultante* dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan.

Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya maka untuk memperjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategis pembangunan dibidang perdagangan dan industri yang terdiri atas kebijakan, program dan sasaran program.

4.3.2 Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan secara merata serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan sasarannya, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan arah pembangunan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan sektor perdagangan dan industri dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah mencakup hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing melalui fasilitas pengembangan industri agro dan non agro
2. Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri.
3. Peningkatan produk bahan baku / penolong domestik sebagai bahan baku pengganti / substitusi impor;
4. Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan Kalteng
5. Peningkatan stabilitasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi;
6. Peningkatan kerjasama ekonomi regional dan internasional;
7. Penumbuhan eksportir baru;
8. Peningkatan pengujian/ sertifikasi mutu barang, kemetrolagian, serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal.

Tabel.4.1
Matriks Tujuan, Sasaran, serta Strategi da Arah Kebijakan
Pembangunan Sektor Perdagangan dan Industri

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pengembangan sektor industri dan nilai tambah industri;	Meningkatkan daya saing sektor industri	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan sektor industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan sektor industri	Peningkatan daya saing melalui fasilitas pengembangan industri agro dan non agro
				Peningkatan daya saing melalui penataan sektor industri
			Mengembangkan bahan baku subtritusi impor	Peningkatan produk bahan baku/ penolong domestik sebagai bahan baku pengganti/ substitusi impor
Mewujudkan penguatan pangsa pasar	Meningkatkan penguatan pangsa pasar	Meningktnya kualitas perdagangan dalam negeri	Memperluas & memperkuat pangsa pasar dalam negeri	Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan Kalteng
Mewujudkan peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;	Meningkatkan ketersediaan pasokan bahan pokok tetap terjamin dan stabilitas harga terjaga	Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri	Memperkuat pengamanan harga pangan / bahan pokok	Peningkatan stabilitasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi
Mewujudkan peningkatan kinerja ekspor non migas	Meningkatkan kinerja ekspor non migas Kalimantan Tengah.	Meningkatnya nilai ekspor non migas perdagangan luar negeri Kalteng	Meningkatkan net ekspor non migas perdagangan luar negeri	Peningkatan kerjasama ekonomi internasional
				Penumbuhan eksportir baru
Mewujudkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan tertib perdagangan	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan tertib ukur dan jaminan mutu produk	Peningkatan Pengujian/ sertifikasi mutu barang, kemetrolagian serta pengawasan perdagangan & jasa ilegal.

Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor perdagangan dan industri diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kalimantan Tengah yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan sektor perdagangan dan industri di Kalimantan Tengah harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam

peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan sektor perdagangan dan industri di Kalimantan Tengah harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan sektor perdagangan dan industri harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor perdagangan dan industri harus mampu membangun kapasitas antara lembaga / institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor perdagangan dan industri harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

Keseluruhan aspek tersebut akan menunjang terciptanya peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri di Kalimantan Tengah dalam percaturan ekonomi nasional dan internasional. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, pembangunan sektor perdagangan dan industri di Kalimantan Tengah didasarkan pada azas-azas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya wilayah yang dimiliki Kalimantan Tengah;
2. Keadilan dalam pemberian peran, perlakuan dan kesempatan berusaha serta pendapatan masyarakat;

3. Keberhasilan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kinerja dan manfaat serta pelestarian lingkungan hidup;
4. Kemandirian wilayah dalam arti memperkecil ketergantungan strategis terhadap kekuatan luar;
5. Pengutamaan peran dan partisipasi masyarakat luas untuk menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik;
6. Harmonisasi dan sinergitas potensi daerah (wilayah/ sektoral) dalam rangka menghadapi persaingan global;
7. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional;
8. Efisiensi dan produktivitas atau penghematan sumber daya untuk mencapai manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya
9. Profesionalisme dan kompetisi; dan
10. Pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan sistem manajemen.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB V

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Dagperin Kalimantan Tengah dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPT tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPT.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra SKPD dibutuhkan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana- an (2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan														Lokasi
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Target Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2021)		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MISI 4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan MISI 8 Pengelolaan Pendapatan Daerah																		
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.409.102.000													
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat	1200 Paket / Buah	1200 Paket / Buah	20.000.000	1200 Paket / Buah	10.000.000	1200 Paket / Buah	10.500.000	1200 Paket / Buah	11.025.000	1200 Paket / Buah	11.576.250	1200 Paket / Buah	12.155.063	7200 Paket / Buah	75.256.313	P. Raya
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya beban rekening telepon, air dan listrik	1 tahun	1 tahun	302.000.000	1 tahun	302.000.000	1 tahun	317.100.000	1 tahun	332.955.000	1 tahun	349.602.750	1 tahun	367.082.888	5 tahun	1.970.740.638	P. Raya
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terbayarnya asuransi gedung kantor	3 unit gedung	3 unit gedung	17.500.000	4 unit gedung	23.500.000	4 unit gedung	23.500.000	4 unit gedung	23.500.000	4 unit gedung	23.500.000	4 unit gedung	23.500.000	4 unit gedung	135.000.000	P. Raya
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat	23 Unit	23 Unit	30.000.000	23 Unit	25.000.000	23 Unit	26.250.000	23 Unit	27.562.500	23 Unit	28.940.625	23 Unit	30.387.656	23 Unit	168.140.781	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor tenaga kontrak, pengelola keuangan dan tim penilai angka kredit	30 orang	30 orang	574.102.000	87 orang	1.317.802.000	87 orang	1.383.692.100	87 orang	1.452.876.705	87 orang	1.525.520.540	87 orang	1.601.796.567	465 orang	7.855.789.913	Palangka Raya
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	25 jenis	25 jenis	251.400.000	25 jenis	11.400.000	25 jenis	11.970.000	25 jenis	12.568.500	25 jenis	13.196.925	25 jenis	13.856.771	25 jenis	314.392.196	Palangka Raya
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya peralatan kerja dalam kondisi baik	10 jenis	10 jenis	20.000.000	10 jenis	20.000.000	10 jenis	21.000.000	10 jenis	22.050.000	10 jenis	23.152.500	10 jenis	24.310.125	10 jenis	130.512.625	Palangka Raya
8	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	30 jenis	30 jenis	120.210.000	30 jenis	80.000.000	30 jenis	84.000.000	30 jenis	88.200.000	30 jenis	92.610.000	30 jenis	97.240.500	30 jenis	562.260.500	Palangka Raya
9	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	100.000.000	1 tahun	140.000.000	1 tahun	147.000.000	1 tahun	154.350.000	1 tahun	162.067.500	1 tahun	170.170.875	5 tahun	873.588.375	Palangka Raya
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik	1 tahun	1 tahun	50.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	21.000.000	1 tahun	22.050.000	1 tahun	23.152.500	1 tahun	24.310.125	5 tahun	160.512.625	Palangka Raya
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku, koran dan peraturan perundang-undangan	1200 ekspl	1200 ekspl	225.000.000	1200 ekspl	68.400.000	1200 ekspl	71.820.000	1200 ekspl	75.411.000	1200 ekspl	79.181.550	1200 ekspl	83.140.628	1200 ekspl	602.953.178	Palangka Raya
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi/kotak makanan/ minuman rapat/ tamu Disperindag	500 porsi	500 porsi	45.000.000	500 porsi	16.000.000	500 porsi	16.800.000	500 porsi	17.640.000	500 porsi	18.522.000	500 porsi	19.448.100	500 porsi	133.410.100	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	1 tahun	228.500.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	157.500.000	1 tahun	165.375.000	1 tahun	173.643.750	1 tahun	182.325.938	5 tahun	1.057.344.688	Luar daerah
14	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah	1 tahun	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	210.000.000	1 tahun	220.500.000	1 tahun	231.525.000	1 tahun	243.101.250	5 tahun	1.305.126.250	Kab/ Kota
15	Rujukan Berobat PNS	Pegawai yang mendapat rujukan berobat	30 persen	30 persen	20.000.000	30 persen	25.000.000	30 persen	26.250.000	30 persen	27.562.500	30 persen	28.940.625	30 persen	30.387.656	30 persen	158.140.781	Palangka Raya
16	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penjaga kantor Dinas Perindag Prov. Kalteng	6 orang	6 orang	146.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palangka Raya
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				990.000.000													
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor dan Aula Dinas Perindag. Prov. Kalteng	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor dan aula Disperindag. Prov Kalteng	1 paket	1 paket	757.000.000	5 Jenis	385.000.000	5 Jenis	404.250.000	5 Jenis	424.462.500	5 Jenis	445.685.625	5 Jenis	467.969.906	25 Jenis	2.884.368.031	Palangka Raya
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	132.888.000	-	-	1 paket	150.000.000	1 paket	157.500.000	1 paket	165.375.000	1 paket	173.643.750	5 paket	779.406.750	Palangka Raya
3	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meja kursi pegawai dan sofa tamu	1 paket	1 paket	150.000.000	-	-	1 paket	175.000.000	1 paket	183.750.000	1 paket	192.937.500	1 paket	202.584.375	5 paket	904.271.875	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya bibit tanaman hias dan terpelihara gedung kantor	1 tahun	1 tahun	100.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	155.000.000	1 tahun	160.000.000	1 tahun	165.000.000	1 tahun	170.000.000	1 tahun	900.000.000	Palangka Raya
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya BBM dan servis kendaraan roda dua dan roda empat	1 tahun	1 tahun	200.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	110.250.000	1 tahun	115.762.500	1 tahun	121.550.625	1 tahun	752.563.125	Palangka Raya
6	Perencanaan Pembangunan Gedung upt. Indsutri makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Gedung kantor yang dipelihara kondisinya	-	-	-	1 tahun -	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	1 tahun	60.775.313	5 tahun	276.281.563	Palangka Raya
7	Rehabilitasi Gedung UPTD BPSMB Palangka Raya	Tersedianya Gedung UPTD BPSMB Palangka Raya dalam kondisi baik dan representatif	1 paket	1 paket	350.000.000	1 paket	350.000.000	1 paket	367.500.000	1 paket	385.875.000	1 paket	405.168.750	1 paket	425.427.188	6 paket	2.283.970.938	Palangka Raya
8	Pemeliharaan gedung kantor rumah kemasn	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	1 tahun	1 tahun	50.000.000	-	-	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	6 tahun	265.506.250	Palangka Raya
9	Pembangunan Gedung Aula Disperindag Prov. Kalteng	Jumlah unit aula gedung kantor	1 paket	1 paket	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1.050.000.000	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Pembangunan Tower Air	Terlaksananya pembangunan tower air kantor Disperindag Prov. Kalteng	1 paket	1 paket	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	350.000.000	Palangka Raya
11	Penataan Taman dan drainase kantor Dinas Perindag. Prov. Kalteng	Tertatanya halaman gedung kantor	1 paket	1 paket	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	800.000.000	Palangka Raya
12	Pengadaan Generator Set (Genset) Gedung Kantor Disperindag Prov.Kalteng	Tersedianya 1 paket genset kantor	1 paket	1 paket	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	300.000.000	Palangka Raya
13	Pembangunan pagar UPTD. BPSMB Palangka Raya	Tersedianya bangunan pagar dalam kondisi baik	1 paket	1 paket	525.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	525.000.000	Palangka Raya
14	Penataan Jaringan Instalasi Listrik Gedung Kantor Disperindag Prov.Kalteng	Tertatanya jaringan instalasi listrik gedung kantor	1 paket	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	200.000.000	Palangka Raya
15	Penataan Halaman Kantor UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Jumlah luasan halaman kantor UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	-	-	-	-	-	500 M²	50.000.000	-	-	-	-	-	-	500 M²	50.000.000	Palangka Raya
16	Penataan Lingkungan UPTD. Metrologi P. Raya	Jumlah luasan UPTD. Metrologi P.Raya yang ditata	-	-	-	-	-	500 M²	100.000.000	-	-	-	-	-	-	500 M²	100.000.000	Palangka Raya

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku Lakip, laporan tahunan, RKA,LPPD, EKPPD,LKPJ serta bahan Rakordal, renja SKPD	10 buku	10 buku	75.000.000	10 buku	85.128.000	10 buku	89.384.400	10 buku	93.853.620	10 buku	98.546.301	10 buku	103.473.616	60 buku	545.385.937	Palangka Raya
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen/laporan keuangan semester	2 laporan	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.500.000	2 laporan	11.025.000	2 laporan	11.576.250	2 laporan	12.155.063	12 laporan	65.256.313	Palangka Raya
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen/laporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.500.000	2 laporan	11.025.000	2 laporan	11.576.250	2 laporan	12.155.063	12 laporan		Palangka Raya
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.000.000	2 laporan	10.500.000	2 laporan	11.025.000	2 laporan	11.576.250	2 laporan	12.155.063	12 laporan		Palangka Raya
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				45.000.000													
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Tercatatnya KIR dan KIB dan pendataan aset Disperindag Prov. Kalteng	1 tahun	1 tahun	90.000.000	1 tahun	45.000.000	1 tahun	47.250.000	1 tahun	49.612.500	1 tahun	52.093.125	1 tahun	54.697.781	6 tahun	338.653.406	Palangka Raya
VII	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				2.202.280													
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Terselenggara nya kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa	14 dokumen	14 dokumen	100.000.000	6 dokumen	65.000.000	6 dokumen	68.250.000	6 dokumen	71.662.500	6 dokumen	75.245.625	6 dokumen	79.007.906	44 dokumen	459.166.031	6 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Facilitas pasar murah menjelang hari besar keagamaan	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan pasar murah	30 kali	30 kali	110.000.000	30 kali	75.000.000	30 kali	78.750.000	30 kali	82.687.500	30 kali	86.821.875	30 kali	91.162.969	180 kali	524.422.344	14 Kab/Kota
3	Bimtek kebijakan perdagangan dalam negeri	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bimtek Kebijakan PDN	30 orang	30 orang	70.000.000	-	-	30 orang	73.500.000	30 orang	77.175.000	30 orang	81.033.750	30 orang	85.085.438	180 orang		Palangka Raya
4	Rapat koordinasi dan sinkronisasi program perindustrian dan perdagangan se Kalteng	Tersusunnya program dan kegiatan Indag se-kalteng sebagai bahan pelaksanaan kegiatan	1 kali	1 kali	100.000.000	1 kali	122.280.000	1 kali	128.394.000	1 kali	134.813.700	1 kali	141.554.385	1 kali	148.632.104	6 kali	775.674.189	Palangka Raya
5	Pembinaan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha (penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi perlindungan konsumen)	Terbinanya konsumen dan pelaku usaha melalui sosialisasi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	50 orang	50 orang	100.000.000	50 orang	65.000.000	50 orang	68.250.000	50 orang	71.662.500	50 orang	75.245.625	50 orang	79.007.906	300 orang	459.166.031	3 Kab/Kota
6	Pembentukan pos penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasi pengaduan konsumen melalui pos pengaduan konsumen	2 Pos	2 Pos	90.000.000	2 Pos	70.000.000	2 Pos	73.500.000	2 Pos	77.175.000	2 Pos	81.033.750	2 Pos	85.085.438	12 Pos	476.794.188	2 Kab/Kota
7	Koordinasi pendistribusian barang sembako dan barang strategis di Kalteng	Mengantisipasi kelangkaan pasokan bahan pokok dan bahan strategis di kabupaten atau kota	56 kali	56 kali	90.000.000	56 kali	75.000.000	56 kali	78.750.000	56 kali	82.687.500	56 kali	86.821.875	56 kali	91.162.969	56 kali	504.422.344	14 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Peneraan alat UTTP kemetrologian	Jumlah alat UTTP yang telah di tera / tera ulang sesuai standar yang berlaku, Kuantita barang terjamin sesuai standar yang berlaku.	12.066 UTTP	13.000 UTTP	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	Kab/Kota
9	Verifikasi dan sertifikasi alat standar UPTD Metrologi P.Raya	Terlaksananya verifikasi dan sertifikasi alat standar lab. UPTD Metrologi di P.Raya	5 jenis	5 jenis	75.000.000	4 jenis	40.000.000	4 jenis	42.000.000	4 jenis	44.100.000	4 jenis	46.305.000	4 jenis	48.620.250	4 jenis	296.025.250	Bandung dan Banjarbaru
10	Pengawasan preventif alat UTTP di Kabupaten / Kota se Kalteng	Jumlah pedagang yang telah memahami UU Metrologi legal	14 Kab/Kota	1 dok	70.000.000	14 Kab/Kota	-	-	52.500.000	14 Kab/Kota	55.125.000	14 Kab/Kota	57.881.250	14 Kab/Kota	60.775.313	14 Kab/Kota	296.281.563	Kab/Kota
11	Pengawasan pos ukur ulang di Kabupaten / Kota Kalimantan Tengah	Jumlah konsumen yang telah memahami UU Metrologi Legal,	14 Kab/Kota	1 dok	55.000.000	14 Kab/Kota	-	-	52.500.000	14 Kab/Kota	55.125.000	14 Kab/Kota	57.881.250	14 Kab/Kota	60.775.313	14 Kab/Kota	281.281.563	Kab/Kota
12	Pertemuan teknis kemetrologian, konsultasi dan identifikasi cap	Jumlah dokumen kegiatan pertemuan teknis kemetrologian	1 dok	1 dok	55.000.000	1 dok	-	-	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	1 dok	60.775.313	6 dok	281.281.563	Bandung
13	Konsultasi dan Koordinasi Teknis Kemetrologian	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Teknis Kemetrologian	2 kali	2 kali	-	2 kali	20.000.000	2 kali	21.000.000	2 kali	22.050.000	2 kali	23.152.500	2 kali	24.310.125	10 kali	256.281.563	Bandung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Pengawasan berkala tim terpadu khusus pangan	Terlaksananya pengawasan tim terpadu (Disdagperin Prov.Kalteng, BPOM, YPK)	42 Toko dan Pelaku	42 Toko dan Pelaku	100.000.000	42 Toko dan Pelaku	60.000.000	42 Toko dan Pelaku	63.000.000	42 Toko dan Pelaku	66.150.000	42 Toko dan Pelaku	69.457.500	42 Toko dan Pelaku	72.930.375	252 Toko dan Pelaku	431.537.875	3 Kab/Kota
15	Pengujian dan Pembelian sampel ikan	Terselenggara nya pengujian dan pembelian sampel kering dan basah untuk mengetahui kandungan bahan berbahaya seperti formalin	12 sampel	12 sampel	85.000.000	12 sampel	60.000.000	12 sampel	63.000.000	12 sampel	66.150.000	12 sampel	69.457.500	12 sampel	72.930.375	72 sampel	416.537.875	6 Kab/Kota
16	Koordinasi program industri dan perdagangan di Kalteng	Koordinasi program indag dan pusat	1 tahun	1 tahun	130.000.000	-	-	1 tahun	105.000.000	1 tahun	110.250.000	1 tahun	115.762.500	1 tahun	121.550.625	5 tahun	582.563.125	14 Kab/Kota dan Luar daerah
17	Verifikasi dan pengelolaan alat-alat standar UPTD Metrologi P.Raya	Jumlah alat standar UPTD Metrologi P.Raya yang terpelihara	200 unit	200 unit	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 unit	75.000.000	P.Raya
18	Bimtek pengawasan & penyuluhan UTTP dan BDKT bagi aparat Kab/ Kota Kalteng	Jumlah peserta Bimtek penyuluhan UTTP dan BDKT	35 orang	35 orang	60.000.000	-	-	-	-	35 orang	75.000.000	-	-	-	-	70 orang	135.000.000	Palangka Raya
19	Peningkatan pengawasan peredaran cukai rokok	Mencegah tindakan penggunaan pita cukai rokok palsu di Kalimantan Tengah	48 Toko dan Pelaku Usaha	48 Toko dan Pelaku Usaha	75.000.000	48 Toko dan Pelaku Usaha	50.000.000	48 Toko dan Pelaku Usaha	52.500.000	48 Toko dan Pelaku Usaha	55.125.000	48 Toko dan Pelaku Usaha	57.881.250	48 Toko dan Pelaku Usaha	60.775.313	288 Toko dan Pelaku Usaha	351.281.563	4 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	Sosialisasi peningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok bagi aparat pembina	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi peningkatan & pengawasan peredaran cukai rokok	20 orang	20 orang	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	Palangka Raya
21	Sosialisasi peningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok bagi pelaku usaha	Pelaku usaha dan konsumen yang mengikuti sosialisasi Peningkatan dan pengawasan peredaran cukai rokok	-	-	-	40 orang	50.000.000	40 orang	52.500.000	40 orang	55.125.000	40 orang	57.881.250	40 orang	60.775.313	200 orang	276.281.563	Palangka Raya
22	Sosialisasi Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen (Siswas-PK)	Pelaku usaha, konsumen dan aparat pembina yang mengikuti sosialisasi sistem pengawasan penyelesaian sengketa konsumen	40 orang	40 orang	75.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	52.500.000	40 orang	55.125.000	40 orang	57.881.250	40 orang	60.775.313	240 orang	351.281.563	Palangka Raya
23	Lomba Cipta Menu Produk Pangan Khas Kalteng	Terciptanya menu produk pangan khas Kalteng	1 kali	1 kali	75.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	63.000.000	1 kali	66.150.000	1 kali	69.457.500	1 kali	72.930.375	6 kali	406.537.875	Palangka Raya
24	Monitoring dan evaluasi penerbitan SIUP dan TDP	Mengetahui pertumbuhan sektor usaha perdagangan	1 Tahun	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	63.000.000	1 Tahun	66.150.000	1 Tahun	69.457.500	1 Tahun	72.930.375	1 Tahun	406.537.875	14 Kab/Kota
25	Pengawasan peredaran bahan berbahaya	Mencegah peredaran bahan berbahaya	18 Toko	18 Toko	65.000.000	18 Toko	60.000.000	18 Toko	63.000.000	18 Toko	66.150.000	18 Toko	69.457.500	18 Toko	72.930.375	108 Toko	396.537.875	6 Kab / Kota
26	Revitalisasi sarana perdagangan (pasar rakyat)	Jumlah revitalisasi sarana perdagangan 1 lokasi	1 paket	1 paket	1.100.000.000	-	-	1 paket	1.100.000.000	1 paket	1.155.000.000	1 paket	1.212.750.000	1 paket	1.273.387.500	5 paket	5.841.137.500	Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27	Pengumpulan data sarana perdagangan berupa pasar dan gudang	Menjaga kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis	1 dok	1 dok	70.000.000	1 dok	45.000.000	1 dok	47.250.000	1 dok	49.612.500	1 dok	52.093.125	1 dok	54.697.781	6 dok	318.653.406	14 Kab/Kota
28	Pembuatan stiker tanda Tera / Tera Ulang	Jumlah stiker tanda tera / tera ulang	1 paket	1 paket	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	45.000.000	Palangka Raya
29	Pembuatan dan Pencetakan Baliho Kemetrolagian	Jumlah baliho kemetrolagian	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	-	Palangka Raya
30	Pasar Peyeimbang Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya 'komoditas yang dapat mempengaruhi inflasi di daerah	1 tahun	1 tahun	80.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	1 tahun	60.775.313	6 tahun	356.281.563	Palangka Raya
31	Diklat Teknis Kemetrolagian	Jumlah aparat yang mengikuti diklat kemetrolagian	3 orang	3 orang	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	60.000.000	Bandung
32	Pemasaran Produk Potensial Daerah Melalui Pasar Lelang	Jumlah kegiatan fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah	1 kali	1 kali	200.000.000	-	-	1 kali	105.000.000	1 kali	110.250.000	1 kali	115.762.500	1 kali	121.550.625	5 kali	652.563.125	Surabaya
33	Misi Dagang Lokal Produk Unggulan Kalimantan Tengah	Terfasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha/UKM produk rotan melalui kegiatan misi dagang lokal	1 kali	1 kali	150.000.000	1 kali	40.000.000	1 kali	42.000.000	1 kali	44.100.000	1 kali	46.305.000	1 kali	48.620.250	6 kali	371.025.250	Cirebon
34	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perlindungan Konsumen	Koordinasi dan konsultasi Bidang Perlindungan Konsumen	1 tahun	1 tahun	60.000.000	-	-	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	1 tahun	60.775.313	5 tahun	286.281.563	Luar daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	Pembuatan Iklan Layanan Konsumen Cerdas Melalui Media Elektronik/ Cetak/ Spanduk/ Baliho	Jumlah Iklan yang ditayangkan	12 kali	12 kali	75.000.000	-	-	12 kali	42.000.000	12 kali	44.100.000	12 kali	46.305.000	12 kali	48.620.250	72 kali	256.025.250	P. Raya
36	Pengawasan Berkala Tim Terpadu Gula Rafinasi	Mencegah peredaran gula rafinasi dalam kemasan eceran	36 toko	36 toko	35.000.000	36 toko	50.000.000	36 toko	52.500.000	36 toko	55.125.000	36 toko	57.881.250	36 toko	60.775.313	216 toko	311.281.563	3 Kab /Kota
37	Pengawasan Berkala Tim Terpadu Minuman Beralkohol	Mencegah peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	20 toko dan pelaku usaha	20 toko dan pelaku usaha	50.000.000	20 toko dan pelaku usaha	60.000.000	20 toko dan pelaku usaha	63.000.000	20 toko dan pelaku usaha	66.150.000	20 toko dan pelaku usaha	69.457.500	20 toko dan pelaku usaha	72.930.375	120 toko dan pelaku usaha	381.537.875	5 Kab/Kota
38	Penilaian UPTD. Metrologi Kabupaten/ Kota	Terbentuknya UPTD Metrologi di Kabupaten/kota	4 kali	4 kali	75.000.000	4 kali	40.000.000	4 kali	42.000.000	4 kali	44.100.000	4 kali	46.305.000	4 kali	48.620.250	24 kali	296.025.250	4 Kab/kota
39	Pembinaan dan Penyuluhan UPTD. Metrologi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan penyuluhan UPTD. Metrologi Kab/Kota	4 kali	4 kali	80.000.000	4 kali	40.000.000	4 kali	42.000.000	4 kali	44.100.000	4 kali	46.305.000	4 kali	48.620.250	24 kali	301.025.250	4 Kab/kota
40	Pendataan UTTP (Ukur, Timbang dan Perlengkapannya) di 14 Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pendataan UTTP di 14 Kab/ Kota	1 dok	1 dok	100.000.000	-	-	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	1 dok	55.125.000	5 dok	320.631.250	14 Kab/Kota
41	Pembangunan Pasar Penyeimbang di Kota Palangka Raya	Jumlah 1 unit pasar penyeimbang di Palangka Raya	1 paket	1 paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	100.000.000	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi penyelesaian sengketa konsumen	30 org	30 org	60.000.000	20 org	50.000.000	20 org	52.500.000	20 org	55.125.000	20 org	57.881.250	20 org	60.775.313	130 org	336.281.563	Kab/Kota
43	Sosialisasi Pengawasan Bahan Berbahaya pada jajanan anak sekolah	Jumlah peserta Sosialisasi Pengawasan Bahan Berbahaya pada jajanan anak sekolah	30 orang	30 orang	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	60.000.000	Palangka Raya
44	Pengawasan Barang Beredar (Bahan Berbahaya dan Barang ber-SNI)	Jumlah dokumen hasil pengawasan barang beredar	1 dok	1 dok	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	30.000.000	Kab/ Kota
45	Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen	Jumlah dokumen hasil pengawasan barang beredar	1 dok	1 dok	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	75.000.000	Kab/ Kota
46	Sosialisasi Bahan Berbahaya	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	-	30 orang	63.000.000	30 orang	66.150.000	30 orang	69.457.500	30 orang	72.930.375	150 orang	271.537.875	Kab/Kota
47	Rapat Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Rapat Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palangka raya
48	Sosialisasi Pencantuman Klausula baku bagi pelaku usaha	Sosialisasi mengenai pencantuman kalimat yang merugikan konsumen yang dibuat secara sepihak oleh pihak pelaku usaha	-	-	-	15 orang	40.000.000	30 orang	42.000.000	30 orang	44.100.000	30 orang	46.305.000	30 orang	48.620.250	150 orang	221.025.250	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Jumlah dokumen BPSK Kalteng	-	-	-	-	-	1 dok	600.000.000	1 dok	700.000.000	1 dok	800.000.000	1 dok	900.000.000	5 dok	3.000.000.000	Kab/Kota
50	Bimtek bagi Mediator BPSK	Jumlah peserta sosialisasi penyelesaian sengketa konsumen	-	-	-	-	-	30 orang	70.000.000	30 orang	80.000.000	30 orang	85.000.000	30 orang	90.000.000	150 orang	325.000.000	Palangka Raya
51	Peningkatan SDM/PPB dan magang Sampel	Jumlah dokumen kegiatan peningkatan SDM/PPB	-	-	-	-	-	1 dok	37.800.000	1 dok	39.690.000	1 dok	41.674.500	1 dok	43.758.225	5 dok	162.922.725	Luar daerah
52	Perencanaan Pembangunan Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan pusat pemasaran produk unggulan Kalteng	-	-	-	1 dok	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	50.000.000	Palangka Raya
53	Bimtek Cinta Produk Indonesia	Jumlah peserta Bimtek Cinta Produk Indonesia	-	-	-	-	-	25 orang	73.500.000	25 orang	77.175.000	25 orang	81.033.750	25 orang	85.085.438	125 orang	316.794.188	Palangka Raya
54	Fasilitasi Pemeliharaan Pasar Penyeimbang	Pemeliharaan dan perawatan fisik Pasar Penyeimbang	-	-	-	1 tahun	60.000.000	1 tahun	63.000.000	1 tahun	66.150.000	1 tahun	69.457.500	1 tahun	72.930.375	5 tahun	331.537.875	Palangka Raya
55	Fasilitasi pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur	Meningkatnya fasilitasi pasar tertib ukur	-	-	-	-	-	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	1 tahun	60.775.313	5 tahun	226.281.563	Kab/Kota
56	Sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan kemetrolgian	Meningkatnya sinkronisasi dan harmonisasi program kemetrolgian	-	-	-	-	-	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	1 tahun	60.775.313	5 tahun	226.281.563	Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57	Identifikasi persiapan pembangunan pusat distribusi Provinsi	Jumlah dokumenfasilitasi pembangunan pusat distribusi provinsi	-	-	-	-	-	1 dok	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dok	100.000.000	Palangka Raya
58	Membuka gerai penjualan produk UKM di lokasi wisata	Tersedianya fasilitas pemasaran produk UKM di lokasi wisata dan sebagai sumber PAD	-	-	-	2 lokasi	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 lokasi	100.000.000	Palangka Raya
59	Pembangunan Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan pusat pemasaran produk unggulan	-	-	-	-	-	1 unit	5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	5.000.000.000	Palangka Raya
60	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah bangunan pusat distribusi	-	-	-	-	-	1 unit gedung	3.500.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit gedung	3.500.000.000	Palangka Raya
61	Fasilitasi Pusat Pemasaran Produk Unggulan Kalteng	Jumlah fasilitasi pemasaran produk unggulan	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	3 tahun	157.625.000	Palangka Raya
62	Pengumpulan Data Distributor dan Pedagang Besar Se-Kalteng	Jumlah dokumen Pengumpulan Data Distributor dan Pedagang Besar Se-Kalteng	-	-	-	-	-	14 dokumen	78.750.000	14 dokumen	82.687.500	14 dokumen	86.821.875	14 dokumen	91.162.969	14 dokumen	339.422.344	14 Kab/Kota
63	Pengawasan Tim Terpadu Bahan Berbahaya	Jumlah dokumen Pengawasan Tim Terpadu Bahan Berbahaya	1 dok	1 dok	100.000.000	-	-	1 dok	110.000.000	1 dok	115.000.000	1 dok	120.000.000	1 dok	125.000.000	4 dok	570.000.000	Kab/Kota
64	Pengawasan SNI dan Label	Jumlah dokumen Pengawasan SNI dan Label	-	-	-	-	-	1 dok	70.000.000	1 dok	75.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	85.000.000	4 dok	310.000.000	Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65	Sosialisasi SNI Pasar rakyat	Jumlah peserta Sosialisasi SNI Pasar rakyat	-	-	-	-	-	30 orang	60.000.000	30 orang	65.000.000	30 orang	70.000.000	30 orang	75.000.000	120 orang	270.000.000	Palangka Raya
66.	Fasilitasi Pemasaran Produk Komoditi pada Gudang SRG	Frekuensi kegiatan fasilitasi	-	-	-	-	-	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	8 kali	800.000.000	Luar Daerah
67.	Koordinasi dan Fasilitasi Perusahaan BUMD untuk bermitra dengan pengusaha sektor perdagangan	Meningkatnya PAD melalui BUMD sektor industri dan sektor perdagangan	-	-	-	2 kali	80.000.000	2 Kali	84.000.000	2 Kali	88.200.000	2 Kali	92.610.000	2 Kali	97.240.500	2 Kali	442.050.500	PalangkaRaya
68.	Bimbingan Teknis Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Sosialisasi peraturan baru tentang perlindungan konsumen	-	-	-	15 orang	40.000.000	15 orang	42.000.000	15 orang	44.100.000	15 orang	46.305.000	15 orang	48.620.250	75 orang	221.025.250	PalangkaRaya
69.	Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pembinaan / Pengawasan	Terselesainya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan	-	-	-	35 sengketa	400.000.000	40 sengketa	420.000.000	45 sengketa	441.000.000	50 sengketa	463.050.000	55 sengketa	486.202.500	225 sengketa	2.210.252.500	4 Kab/Kota
VIII	Program Peningkatan dan Pengemba-ngan Ekspor				1.650.000.000													
1	Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutu barang ekspor & import	Tersedianya peralatan standar laboratorium pengujian dan kalibrasi	12 Unit	12 Unit	80.000.000	8 Unit	65.000.000	8 Unit	68.250.000	8 Unit	71.662.500	8 Unit	75.245.625	8 Unit	79.007.906	52 Unit	439.166.031	P.Raya
2	Pembinaan untuk mendapatkan sertifikasi produk pengguna tanda SNI	Perusahaan mendapatkan informasi penerapan SNI	1 Perusahaan	1 Perusaha-an	50.000.000	3 Perusaha-an	60.000.000	3 Perusaha-an	63.000.000	3 Perusaha-an	66.150.000	3 Perusaha-an	69.457.500	3 Perusaha-an	72.930.375	16 Perusaha-an	381.537.875	Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Pengawasan dan penilikan kualitas produk ekspor	Tersedianya dokumen pengawasan kualitas produk ekspor	1 Perusahaan	1 Perusahaan	45.000.000	3 Perusahaan	60.000.000	3 Perusahaan	63.000.000	3 Perusahaan	66.150.000	3 Perusahaan	69.457.500	3 Perusahaan	72.930.375	16 Perusahaan	376.537.875	Kab/Kota
4	Penilaian atas sertifikat produk pengguna tanda SNI yang diberikan BPSMB di 14 Kab/Kota	Produk yang dihasilkan sesuai SNI	1 Perusahaan	1 Perusahaan	50.000.000	3 Perusahaan	60.000.000	3 Perusahaan	63.000.000	3 Perusahaan	66.150.000	3 Perusahaan	69.457.500	3 Perusahaan	72.930.375	16 Perusahaan	381.537.875	Kab/Kota
5	Pembinaan produk berorientasi ekspor di BPSMB untuk 14 Kab/Kota	Jumlah dokumen pembinaan produk ekspor	1 dok	1 dok	75.000.000	-	-	1 dok	73.500.000	1 dok	77.175.000	1 dok	81.033.750	1 dok	85.085.438	6 dok	391.794.188	Kab/Kota
6	Pelatihan dan bimbingan teknis peningkatan mutu bokor	Petani dan Pedagang pengepul bokor menerapkan standar mutu karet	20 orang	20 orang	50.000.000	20 orang	60.000.000	20 orang	63.000.000	20 orang	66.150.000	20 orang	69.457.500	20 orang	72.930.375	120 orang	381.537.875	P.Raya
7	Pelatihan teknis diklat pengujian mutu barang	Peningkatan kompetensi aparat penguji mutu barang	11 orang	11 orang	90.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	63.000.000	10 orang	66.150.000	10 orang	69.457.500	10 orang	72.930.375	61 orang	421.537.875	luar daerah
8	Rapat koordinasi sistem jaringan laboratorium penguji mutu barang	Jumlah aparat yang mengikuti Rakor sistem jaringan Lab. Penguji Mutu Barang	15 orang	15 orang	50.000.000	-	-	15 orang	52.500.000	15 orang	55.125.000	15 orang	57.881.250	15 orang	60.775.313	15 orang	276.281.563	Luar Daerah
9	Akreditasi /survey-lance oleh KAN di BPSMB P.Raya	Pengakuan dari komite akreditasi nasional (KAN)	1 kali	1 kali	45.000.000	2 kali	50.000.000	2 kali	52.500.000	2 kali	55.125.000	2 kali	57.881.250	2 kali	60.775.313	11 kali	321.281.563	P. Raya
10	Penyediaan makanan dan minuman Petugas Penguji Mutu Barang dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh	Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh penguji	1 tahun	1 tahun	55.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	42.000.000	1 tahun	44.100.000	1 tahun	46.305.000	1 tahun	48.620.250	6 tahun	276.025.250	P. Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Sinkronisasi Pengujian antar Laboratorium Pemerintah dan Swasta	Terciptanya persamaan persepsi dibidang pengujian	20 orang	20 orang	50.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	52.500.000	15 orang	55.125.000	15 orang	57.881.250	15 orang	60.775.313	95 orang	326.281.563	P. Raya
12	Uji Banding / Profisiensi test antar Laboratorium yang terakreditasi	Terciptanya unjuk kerja laboratorium pengujian dan kalibrasi	2 kali	2 kali	80.000.000	2 kali	80.000.000	2 kali	84.000.000	2 kali	88.200.000	2 kali	92.610.000	2 kali	97.240.500	2 kali	522.050.500	Luar daerah
13	Promosi dan informasi pelayanan BPSMB	Dokumen hasil promosi dan informasi pelayanan BPSMB	1 dok	1 dok	25.000.000	-	-	1 dok	26.250.000	1 dok	27.562.500	1 dok	28.940.625	1 dok	30.387.656	1 dok	138.140.781	P. Raya
14	Kalibrasi alat standar pengujian UPTD BPSMB P.Raya	Tersedianya alat standar kalibrasi yang tertelusur ke standar internasional	20 alat	20 alat	50.000.000	20 alat	50.000.000	20 alat	52.500.000	20 alat	55.125.000	20 alat	57.881.250	20 alat	60.775.313	120 alat	326.281.563	Luar daerah
15	Sosialisasi Laboratorium Kalibrasi Lab. Pemerintah dan Lab. Swasta se-Kalteng	Jumlah peserta sosialisasi Laboratorium kalibrasi Lab. Pemerintah dan Lab. Swasta	30 orang	30 orang	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	135.000.000	14 Kab / Kota
16	Identifikasi Potensi Ekspor	Tersedianya informasi tentang potensi komoditi ekspor	50 UKM	50 UKM	50.000.000	50 UKM	65.000.000	50 UKM	68.250.000	50 UKM	71.662.500	50 UKM	75.245.625	50 UKM	79.007.906	300 UKM	409.166.031	14 Kab / Kota
17	Pelatihan Ekspor	Peningkatan pengetahuan bagi UKM	20 orang	20 orang	65.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	52.500.000	20 orang	55.125.000	20 orang	57.881.250	20 orang	60.775.313	120 orang	341.281.563	Palangka Raya
18	Partisipasi Pada Pameran Dalam Negeri	Jumlah pameran yang diikuti 1 kali	1 dok	1 dok	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	80.000.000	P. Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Ekspor dan Impor	Jumlah dokumen hasil pemantauan & evaluasi kinerja ekspor & impor	1 dok	1 dok	45.000.000	-	-	1 dok	47.250.000	1 dok	49.612.500	1 dok	52.093.125	1 dok	54.697.781	1 dok	248.653.406	P. Raya
20	Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	Terpenuhinya informasi terbaru mengenai kebijakan perdagangan luar negeri untuk pelaku usaha	30 orang	30 orang	60.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	52.500.000	20 orang	55.125.000	20 orang	57.881.250	20 orang	60.775.313	130 orang	336.281.563	P. Raya
21	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet	Peningkatan pengetahuan mengenai pasar ekspor	40 orang	40 orang	55.000.000	20 orang	50.000.000	20 orang	52.500.000	20 orang	55.125.000	20 orang	57.881.250	20 orang	60.775.313	130 orang	331.281.563	Palangka Raya
22	Pendidikan Profesi Manajemen Ekspor Impor	Jumlah peserta pendidikan profesi manajemen ekspor impor	40 orang	40 orang	55.000.000	-	-	40 orang	57.750.000	40 orang	60.637.500	40 orang	63.669.375	40 orang	66.852.844	40 orang	303.909.719	P. Raya
23	Pemeliharaan Gedung dan Pengecatan UPTD BPSMB Palangka Raya	Jumlah unit gedung UPTD. BPSMB yang terpelihara	1 unit gedung	1 unit gedung	120.000.000	-	-	1 unit gedung	52.500.000	1 unit gedung	55.125.000	1 unit gedung	57.881.250	1 unit gedung	60.775.313	1 unit gedung	346.281.563	P. Raya
24	Pemasangan Instalansi Listrik/Panel di Ruang Lab. Mill UPTD. BPSMB P.Raya	Jumlah pengadaan pemasangan instalasi listrik / panel	1 paket	1 paket	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	25.000.000	P. Raya
25	Pengadaan Generator (Genset) BPSMB Palangka Raya	Jumlah pengadaan genset	1 paket	1 paket	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	150.000.000	P. Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Kalibrasi Alat ukur Laboratorium	Bertambahnya alat laboratorium yang dikalibrasi untuk perusahaan dan penambahan penerimaan PAD	-	-	-	4 kali	50.000.000	4 kali	52.500.000	4 kali	55.125.000	4 kali	57.881.250	4 kali	60.775.313	20 kali	276.281.563	4 Kab/Kota
27	Pengadaan Alat Laboratorium dan Sarana Penunjang pada UPTD BPSMB Palangka Raya	Meningkatnya kinerja pelayanan UPTD BPSMB Palangka Raya	-	-	-	1 Paket	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	500.000.000	P. Raya
28	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	Jumlah Pengadaan alat	-	-	-	-	-	1 kali	80.000.000	1 kali	84.000.000	1 kali	88.200.000	1 kali	92.610.000	1 kali	344.810.000	Batam
29	Monitoring Evaluasi Data Impor Se-Kalteng	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi data impor se-kalteng	-	-	-	-	-	1 dok	60.000.000	1 dok	63.000.000	1 dok	66.150.000	1 dok	69.457.500	1 dok	258.607.500	
30	PANJATAPDA	Jumlah dokumen PANJATAPDA	-	-	-	-	-	1 dok	75.000.000	1 dok	78.750.000	1 dok	82.687.500	1 dok	86.821.875	1 dok	323.259.375	
31	Pemasangan Instalasi Listrik Lab. Mill UPT. BPSMB	Jumlah paket pemasangan instalasi listrik lab BPSMB	-	-	-	-	-	1 paket	35.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	35.000.000	Palangka raya
32	Pelatihan Ekspor untuk UKM di Kalteng	Jumlah peserta pelatihan	-	-	-	-	-	30 orang	75.000.000	30 orang	80.000.000	30 orang	85.000.000	30 orang	90.000.000	120 orang	330.000.000	P.Raya
33	Workshop sistem jaringan laboratorium penguji mutu barang	Sinergitas antar jaringan laboratorium penguji mutu barang	-	-	-	10 orang	50.000.000	10 orang	52.500.000	10 orang	55.125.000	10 orang	57.881.250	10 orang	60.775.313	50 orang	276.281.563	Luar daerah
34	Edukasi Publik Tentang MEA	Mempersiapka n pelaku usaha dalam persaingan MEA	-	-	-	20 orang	50.000.000	20 orang	52.500.000	20 orang	55.125.000	20 orang	57.881.250	20 orang	60.775.313	100 orang	276.281.563	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	Sosialisasi Kemampuan / Kompetensi di Bidang Pengujian dan Kalibrasi UPT BPSMB Palangka Raya	Meningkatnya Kemampuan dan wawasan peserta kegiatan di bidang pengujian	-	-	-	50 orang	150.000.000	50 orang	157.500.000	50 orang	165.375.000	50 orang	173.643.750	50 orang	182.325.938	250 orang	828.844.688	Palangka Raya
IX	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				550.000.000													
1	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya peningkatan sistem dan jaringan informasi indag	1 tahun	1 tahun	70.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	55.125.000	1 tahun	57.881.250	1 tahun	60.775.313	6 tahun	346.281.563	Palangka Raya
2	Partisipasi pada Pekan Raya Jakarta	Fasilitasi dalam rangka meningkatkan segmen dan perluasan pasar bagi UKM	4 ukm	4 ukm	105.000.000	4 ukm	100.000.000	4 ukm	105.000.000	4 ukm	110.250.000	4 ukm	115.762.500	4 ukm	121.550.625	24 ukm	657.563.125	Jakarta
3	Kalteng Expo	Meningkatnya segmen pasar dan perluasan pasar bagi UKM	5 ukm	5 ukm	210.000.000	5 ukm	250.000.000	5 ukm	262.500.000	5 ukm	275.625.000	5 ukm	289.406.250	5 ukm	303.876.563	30 ukm	1.591.407.813	P. Raya
4	Pengolahan dan analisis data industri dan perdagangan kabupaten/kota di Kalteng	Jumlah dokumen hasil pengolahan data indag Kab/Kota di Kalteng dan publikasi data melalui media Videotron	1 tahun	1 tahun	170.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	78.750.000	1 tahun	82.687.500	1 tahun	86.821.875	1 tahun	91.162.969	6 tahun	584.422.344	Palangka Raya
5	Partisipasi Pada Pameran Sulut Expo	Jumlah kegiatan Pameran Sulut Expo	1 kali	1 kali	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	85.000.000	Sulut
6	Partisipasi Pada Pameran Sumut Expo	Jumlah kegiatan Sumut Expo	1 kali	1 kali	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	85.000.000	Sumut

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Partisipasi Pada Pameran Jabar Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada Pameran Jabar Expo	-	-	-	-	-	1 kali	80.000.000	-	-	-	-	-	-	1 kali	80.000.000	Jabar
8	Partisipasi Pada Pameran Pariwisata, Perdagangan dan Investasi	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada Pameran Pariwisata, Perdagangan dan Investasi	1 kali	1 kali	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	80.000.000	Luar Daerah
9	Partisipasi Pada Pameran Produk, Industri Agri dan Food Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada Pameran Produk, Industri Agro dan Food Expo	1 kali	1 kali	75.000.000	-	-	1 kali	85.000.000	-	-	-	-	-	-	2 kali	160.000.000	Luar Daerah
10	Pertemuan antar Pelaku dan Instansi Terkait	Jumlah peserta Pertemuan antar Pelaku dan Instansi terkait	30 orang	30 orang	50.000.000	-	-	30 orang	63.000.000	30 orang	66.150.000	30 orang	69.457.500	30 orang	72.930.375	30 orang	381.537.875	P. Raya
11	Partisipasi Pada Pameran Solo Inafact	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada Pameran Solo Inafact	1 kali	1 kali	80.000.000	-	-	1 kali	80.000.000	-	-	-	-	-	-	2 kali	160.000.000	Solo
12	Partipasi Pada Pameran Indag	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada Pameran Indag	1 kali	1 kali	500.000.000	-	-	1 kali	75.000.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	90.000.000	5 kali	840.000.000	Luar daerah
13	Pelatihan Bintek Pengrajin UKM tentang Pengembangan Usaha	Jumlah dokumen kegiatan bintek pengrajin UKM	-	-	-	-	-	1 dok	68.250.000	1 dok	71.662.500	1 dok	75.245.625	1 dok	79.007.906	5 dok	294.166.031	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Monitoring dan Evaluasi Pengrajin UKM di 14 Kab./Kota se-Kalteng	Jumlah dokumen hasil Monitoring & Evaluasi Pengrajin UKM	14 dokumen	14 dokumen	65.000.000	-	-	14 dokumen	89.250.000	14 dokumen	93.712.500	14 dokumen	98.398.125	14 dokumen	103.318.031	14 dokumen	449.678.656	Kab/Kota
15	Partisipasi Pada Pameran Kemilau Kaltim Nasional Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan partisipasi pada Pameran Kemilau Kaltim nasional Expo	1 kali	1 kali	75.000.000	-	-	1 kali	60.000.000	-	-	1 kali	70.000.000	1 kali	73.500.000	4 kali	278.500.000	Samarinda
16	Partisipasi Pada Festival Budaya Isen Mulang	Dalam rangka memperingati dan memeriahkan HUT Kalteng	1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	78.750.000	1 kegiatan	82.687.500	1 kegiatan	86.821.875	1 kegiatan	91.162.969	6 kegiatan	464.422.344	Palangka Raya
17	Magang Untuk Pengrajin UKM Ke Luar Daerah	Jumlah dokumen magang	-	-	-	-	-	1 dok	60.000.000	1 dok	63.000.000	1 dok	66.150.000	-	-	3 dok	189.150.000	Cirebon
18	Pengemba-ngan dan peningkatan usaha bagi generasi muda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengemba-ngan dan peningkatan usaha	-	-	-	-	-	1 dok	60.000.000	1 dok	63.000.000	1 dok	66.150.000	1 dok	69.457.500	4 dok	258.607.500	Palangka Raya
19	Partisipasi Pada Pameran Jogja Expo	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Jogja Expo	1 dok	1 dok	85.000.000	-	-	-	-	1 kali	85.000.000	1 kali	89.250.000	1 kali	93.712.500	4 kali	352.962.500	Jogja
20	Partisipasi Pada Pameran Produksi Indusri Agro	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Industri Agro	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	85.000.000	1 kali	89.250.000	1 kali	93.712.500	3 kali	267.962.500	Luar Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	Partisipasi Pada Pameran Produk Agribisnis dan Pangan Indonesia di Jogja	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran Produk Agribisnis dan Pangan Indonesia di Jogja	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	85.000.000	1 kali	89.250.000	1 kali	93.712.500	3 kali	267.962.500	Jogja
22	Partisipasi Gelar Produk Daerah GPD Expo di Mega Mall Batam Center	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Gelar Produk Daerah GPD Expo di Mega Mall Batam Center	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	85.000.000	1 kali	89.250.000	1 kali	93.712.500	3 kali	267.962.500	Batam
23	Magang untuk Pengrajin UKM ke Tasikmalaya Jawa Barat	Jumlah Dokumen Magang	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	85.000.000	1 dok	89.250.000	1 dok	93.712.500	3 dok	267.962.500	Tasik-malaya
X	Program Penumbuhan Industri Agro				460.000.000													
1	Rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan industri aneka	Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan rencana Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka	1 dok	1 dok	85.000.000	-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	5 dok	300.506.250	Luar Daerah
2	Pendataan dan identifikasi potensi komoditi logam	Hilirisasi produk industri logam	1 kali	1 kali	75.000.000	8 kali	40.000.000	8 kali	42.000.000	8 kali	44.100.000	8 kali	46.305.000	8 kali	48.620.250	41 kali	296.025.250	13 Kab / 1 Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, dan Sarana Produksi di Bidang Industri Kayu Sengon	Peningkatan kemampuan pelaku usaha di bidang meubel kayu	20 orang	20 orang	85.000.000	10 orang	60.000.000	10 orang	63.000.000	10 orang	66.150.000	10 orang	69.457.500	10 orang	72.930.375	70 orang	416.537.875	Palangka Raya
4.	Sosialisasi Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Aneka Industri	Jumlah aparat pembina mengikuti sosialisasi pengembangan dan penerapan teknologi di bidang AI	30 orang	30 orang	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	85.000.000	P. Raya
5	Magang Hilirisasi Industri Hasil Karet Bagi Pelaku Usaha Karet	Jumlah pelaku usaha karet yang mengikuti magang hilirisasi indutri hasil karet	5 orang	5 orang	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	85.000.000	Luar daerah
6	Sosialisasi Teknologi Pengolahan Pangan di Bidang Aneka Industri	Jumlah peserta sosialisasi teknologi pengolahan pangan	20 orang	20 orang	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	85.000.000	Palangka Raya
7	Sosialisasi Teknologi Industri Alat Transportasi	Jumlah peserta sosialisasi teknologi industri alat transportasi	10 orang	10 orang	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 orang	60.000.000	Palangka Raya
8	Pendataan dan Identifikasi Potensi Sentra Industri Hasil Laut	Jumlah dokumen data base informasi potensi sentra industri hasil laut	1 dok	1 dok	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	60.000.000	Kotim, Seruyan, Kobar; Sukamara
9	Magang teknologi industri pengolahan pangan hasil laut bagi pelaku usaha di Bidang Aneka Industri	Peningkatan Pengetahuan bagi pelaku usaha pangan	8 orang	8 orang	75.000.000	6 orang	60.000.000	6 orang	63.000.000	6 orang	66.150.000	6 orang	69.457.500	6 orang	72.930.375	38 orang	406.537.875	Luar daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Pendataan dan Identifikasi Industri Agro	Jumlah dokumen pendataan industri agro	1 dok	1 dok	75.000.000	-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	52.500.000	1 dok	55.125.000	1 dok	57.881.250	6 dok	290.506.250	13 Kab / 1 Kota
11	Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Kawasan Industri	Tersedianya dokumen rencana persiapan kawasan industri di 7 Kabupaten	1 kali	1 kali	200.000.000	2 kali	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali	300.000.000	7 Kab/kota
12	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Komoditi Unggulan	Tersedianya dokumen rencana pembangunan Industri Provinsi (RPIP)	-	-	-	1 dok	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	200.000.000	Palangka Raya
13	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri Papan Rotan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek pengembangan usaha dan sarana produksi industri papan rotan	-	-	-	-	-	20 orang	70.000.000	20 orang	73.500.000	-	-	-	-	40 orang	143.500.000	Palangka Raya
14	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha, dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri Kelapa Sawit	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek pengembangan usaha dan sarana produksi industri kelapa sawit	-	-	-	-	-	20 orang	73.500.000	20 orang	77.175.000	20 orang	81.033.750	20 orang	85.085.438	100 orang	386.794.188	Palangka Raya
15	Pelatihan Pengolahan Produk Hilirisasi Kelapa	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	-	20 orang	73.500.000	20 orang	77.175.000	20 orang	81.033.750	20 orang	85.085.438	100 orang	386.794.188	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Pelatihan Pengolahan Industri Pakan Ternak dari Limbah Ikan Laut	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengolahan pakan ternak dari limbah ikan laut	-	-	-	-	-	5 orang	63.000.000	5 orang	66.150.000	5 orang	69.457.500	5 orang	72.930.375	25 orang	331.537.875	Seruyan
17	Pendataan dan Identifikasi Potensi Industri Kayu dan Rotan	Tersedianya Data Potensi Industri Kayu dan Rotan	-	-	-	-	-	1 dok	63.000.000	1 dok	66.150.000	1 dok	69.457.500	1 dok	72.930.375	5 dok	331.537.875	13 Kab / 1 Kota
18	Magang Teknologi Industri Pengolahan Barang dari Karet	Jumlah peserta magang teknologi industri pengolahan barang dari karet	-	-	-	-	-	6 orang	65.000.000	6 orang	68.250.000	6 orang	71.662.500	6 orang	75.245.625	24 orang	280.158.125	luar daerah
19	Magang Teknologi Industri Pengolahan Kayu Sengon	Jumlah peserta magang teknologi industri pengolahan kayu sengon	-	-	-	-	-	6 orang	65.000.000	6 orang	68.250.000	6 orang	71.662.500	6 orang	75.245.625	24 orang	280.158.125	luar daerah
20	Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha dan Sarana Produksi di Bidang Aneka Industri	-	-	-	-	-	20 orang	70.000.000	20 orang	73.500.000	20 orang	77.175.000	20 orang	81.033.750	80 orang	301.708.750	
21	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalan Bun, Seruyan dan Sampit	Jumlah dokumen Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalan Bun, Seruyan dan Sampit	-	-	-	-	-	1 dok	150.000.000	1 dok	157.500.000	1 dok	165.375.000	1 dok	173.643.750	4 dok	646.518.750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Studi Banding ke Kawasan Industri	Jumlah dokumen Studi Banding ke Kawasan Industri	-	-	-	-	-	10 orang	100.000.000	10 orang	105.000.000		-		-	20 orang	205.000.000	
23	Partisipasi Pameran Pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Partisipasi Pameran Pangan	-	-	-	-	-	1 kali	80.000.000	1 kali	84.000.000	1 kali	88.200.000	1 kali	92.610.000	4 kali	344.810.000	
24	Partisipasi Pameran Furniture	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Pameran Furniture	-	-	-	-	-	1 kali	110.000.000	1 kali	115.500.000	1 kali	121.275.000	1 kali	127.338.750	4 kali	474.113.750	
25	Pelatihan Teknologi Desain Furniture Kayu dan Rotan	Jumlah Peserta Pelatihan	-	-	-	-	-	10 orang	80.000.000	10 orang	84.000.000	10 orang	88.200.000	10 orang	92.610.000	40 orang	344.810.000	
26	Pelatihan Tekonologi Pengolahan Industri Pangan	Jumlah peserta Pelatihan Tekonologi Pengolahan Industri Pangan	-	-	-	-	-	6 orang	75.000.000	6 orang	78.750.000	6 orang	82.687.500	6 orang	86.821.875	24 orang	323.259.375	
27	Magang Teknologi Pengolahan Furniture Rotan	Jumlah peserta Magang Teknologi Pengolahan Furniture Rotan	-	-	-	-	-	6 orang	80.000.000	6 orang	84.000.000	-	-	-	-	12 orang	164.000.000	
28	Magang Teknologi Pengolahan Furniture Kayu	Jumlah peserta Magang Teknologi Pengolahan Furniture Kayu	-	-	-	-	-	6 orang	80.000.000	6 orang	84.000.000	-	-	-	-	12 orang	164.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Bimbingan Teknis Pengolahan Kerajinan Perak	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengolahan Kerajinan Perak	-	-	-	-	-	10 orang	60.000.000	10 orang	63.000.000	10 orang	66.150.000	10 orang	69.457.500	40 orang	258.607.500	
30	Magang Teknologi Pengolahan Kerajinan Perak	Jumlah peserta Magang Teknologi Pengolahan Kerajinan Perak	-	-	-	-	-	6 orang	60.000.000	6 orang	63.000.000	6 orang	66.150.000	6 orang	69.457.500	24 orang	258.607.500	
31	Magang Teknologi Industri Pengolahan Papan Rotan	Jumlah peserta Magang Teknologi Industri Pengolahan Papan Rotan	-	-	-	-	-	6 orang	70.000.000	6 orang	73.500.000	-	-	-	-	12 orang	143.500.000	
32	Pelatihan Tekonologi Industri Pengolahan Papan Rotan	Jumlah peserta Pelatihan Tekonologi Industri Pengolahan Papan Rotan	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	90.000.000	15 orang	94.500.000	-	-	30 orang	184.500.000	
33	Bantuan Mesin Peralatan dan Pendampingan Pengolahan Papan Rotan	Jumlah bantuan mesin peralatan pendampingan papan rotan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000	2 paket	1.200.000.000	
XI	Program Pengemba-ngan Industri Kecil dan Menengah				2.042.520.000													
1	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan sentra IK	Peningkatan peranan sentra IK di Kalteng dalam produksi dan pemsaran	1 tahun	1 tahun	70.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	63.000.000	1 tahun	66.150.000	1 tahun	69.457.500	1 tahun	72.930.375	6 tahun	401.537.875	14 Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Mengikuti pameran produk mutu manikam binaan Dekranasda Kalimantan Tengah	Meningkatnya promosi produk mutu manikam binaan Dekranasda Kalteng	1 kali	1 kali	80.000.000	-	-	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	100.000.000	5 kali	435.000.000	Jakarta
3	Mengikuti pameran produk kerajinan/inacraft binaan Dekranasda Kalimantan Tengah	Meningkatnya promosi kerajinan khas Kalteng	1 kali	1 kali	70.000.000	-	-	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	110.000.000	6 kali	455.000.000	Jakarta
4	Pemeliharaan dan penataan showroom Dekranasda	Terciptanya showroom Dekranasda yang tertata, aman dan bersih	1 tahun	1 tahun	225.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	78.750.000	1 tahun	82.687.500	1 tahun	86.821.875	1 tahun	91.162.969	6 tahun	639.422.344	P. Raya
5	Pelatihan manajemen usaha bagi IKM	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen usaha bagi IKM	1 kali	1 kali	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	65.000.000	Luar daerah
6	Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Unggulan Binaan Dekranasda Kalteng	Meningkatnya promosi kerajinan khas Kalteng	1 kali	1 kali	80.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	78.750.000	1 kali	82.687.500	1 kali	86.821.875	1 kali	91.162.969	6 kali	494.422.344	Luar daerah
7	Pelatihan Industri Kreatif bagi Generasi Muda	Meningkatnya kemamouan peserta generasi muda dalam pembuatan olahan industri kreatif	30 orang	30 orang	70.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	52.500.000	15 orang	55.125.000	15 orang	57.881.250	15 orang	60.775.313	105 orang	346.281.563	Pulang Pisau (2017), Kapuas (2018), Lamandau (2019), Bartim (2020), Seruyan (2021)
8	Lomba Menganyam Khas Kalteng	Peningkatan kualitas produk anyaman khas kalteng	15 orang	15 orang	75.000.000	-	-	20 orang	80.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	85.000.000	20 orang	85.000.000	110 orang	405.000.000	P. Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Dasar	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengrajin rotan	20 orang	20 orang	70.000.000	-	-	20 orang	73.500.000	20 orang	77.175.000	20 orang	81.033.750	20 orang	85.085.438	120 orang	386.794.188	P. Raya
10	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Ahli	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengrajin rotan	20 orang	20 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	P. Raya
11	Magang Anyaman Rotan	Jumlah peserta magang anyaman rotan	5 orang	5 orang	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	85.000.000	P. Raya
12	Pelatihan dasar teknik pengelasan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM pengelasan	30 orang	30 orang	70.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	52.500.000	15 orang	55.125.000	15 orang	57.881.250	15 orang	60.775.313	105 orang	405.000.000	Katingan (2017), Gunung Mas (2018), Lamandau (2019), Murung Raya (2020), Seruyan (2021)
13	Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)	Meningkatnya promosi produk unggulan kreatif Kalteng	1 kali	1 kali	75.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	78.750.000	1 kali	82.687.500	1 kali	86.821.875	1 kali	91.162.969	6 kali	405.000.000	Luar daerah
14	Pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknik pembuatan meubelair rotan	25 orang	25 orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 orang	100.000.000	Palangka Raya
15	Rapat Kerja Daerah Dekranasda Prov. Kalteng dan Rakernas Dekranas	Meningkatnya sinergitas program kerja Dekranasda pusat dengan daerah	1 kali	1 kali	100.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	84.000.000	1 kali	88.200.000	1 kali	92.610.000	1 kali	97.240.500	6 kali	405.000.000	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	Pengadaan Peralatan Pandai Besi	Jumlah pengadaan peralatan pandai besi	1 paket	1 paket	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	250.000.000	Palangka Raya
17	UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya operasional UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	1 tahun	600.000.000	-	-	1 tahun	750.000.000	1 tahun	800.000.000	1 tahun	825.000.000	1 tahun	850.000.000	6 tahun	3.825.000.000	Palangka Raya
18	Pelatihan pengembangan desain produk anyaman rotan	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengrajin rotan	20 orang	20 orang	65.000.000	15 orang	50.000.000	15 orang	52.500.000	15 orang	55.125.000	15 orang	57.881.250	15 orang	60.775.313	95 orang	341.281.563	Palangka Raya
19	Analisa Pasar/Kebutuhan Kemasan IKM Kalteng	Tersedianya analisa pasar/kebutuhan kemasan IKM Kalteng	1 tahun	1 tahun	60.000.000	-	-	1 tahun	65.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	82.500.000	1 tahun	85.000.000	1 tahun	372.500.000	Dalam dan Luar Daerah
20	Pelatihan Pembuatan Mainan Anak (PAUD)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan mainan anak	15 orang	15 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	75.000.000	Kab. kapuas
21	Pengadaan Peralatan Pengolahan Air Minum Isi Ulang	Tersedianya peralatan pengolahan air minum isi ulang	6 paket	6 paket	450.000.000	5 paket	332.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11 paket	782.520.000	Kab/Kota
22	Mengikuti Pameran Furniture di Jakarta	Jumlah kegiatan pelaksanaan Partisipasi pada Pameran	1 kali	1 kali	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	100.000.000	Jakarta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
23	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang IKM	Jumlish dok rapat dan dan konsultasi bidang IKM	1 dok	1 dok	75.000.000	-	-	1 dok	100.000.000	1 dok	125.000.000	1 dok	125.000.000	1 dok	130.000.000	5 dok	555.000.000	Kab/Kota
24	Pelatihan Reparasi Kendaraan Bermotor Roda 2	Jumlah peserta Pelatihan Reparasi Kendaraan Bermotor Roda 2	15 orang	15 orang	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	80.000.000	P. Raya
25	Pelatihan Reparasi Alat Elektronik Handphone	Jumlah peserta Pelatihan Reparasi Alat Elektronik Handphone	15 orang	15 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	75.000.000	P. Raya
26	Magang Pembuatan Pengolahan Pandai Besi	Jumlah peserta Magang Pembuatan Pengolahan Pandai Besi	5 orang	5 orang	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	80.000.000	Luar daerah
27	Magang Teknik Pengelasan Logam	Jumlah peserta Magang Teknik Pengelasan Logam	5 orang	5 orang	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	85.000.000	luar daerah
28	Pelatihan Pemodelan Digital Untuk Desain Produk Olahan Kayu dan Rotan	Jumlah peserta Pelatihan Pemodelan Digital untuk Desain Produk Olahan Kayu dan Rotan	15 orang	15 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	75.000.000	P. Raya
29	Pelatihan Kemasan Bagi IKM Pangan	Jumlah peserta Pelatihan Kemasan & bantuan peralatan bg IKM Pangan	15 orang	15 orang	70.000.000	-	-	15 orang	65.000.000	15 orang	70.000.000	15 orang	75.000.000	15 orang	75.000.000	90 orang	355.000.000	Kabupaten Kapuas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	Pelatihan Pengolahan Pangan Berbasis Durian	Jumlah peserta Pelatihan pengo-lahan pangan berbasis durian	15 orang	15 orang	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	65.000.000	P. Raya
31	Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) Bagi Industri Kecil dan Menengah Pangan	Jumlah peserta Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) bagi IKM pangan	10 orang	10 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	-
32	Magang WUB Industri Pengolahan Pangan dari Kabupaten Barito Selatan	Jumlah peserta Magang WUB Industri	10 orang	10 orang	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 orang	-
33	Pelatihan Diversifikasi Makanan Ringan Berbasis Pisang	Jumlah peserta Pelatihan diversifi-kasi makanan ringan	20 orang	20 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	Bartim, Gunung Mas
34	Kemasan Kepada IKM Kalimantan Tengah	Jumlah fasili-tasi bantuan kemasan kepada IKM Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota	70.000.000	14 Kab / kota
35	Pelatihan Bordir Kain Bagi IKM Sandang	Jumlah peserta pelatihan bordir kain bagi IKM Sandang	15 orang	15 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 orang	75.000.000	P. Raya
36	Pelatihan Pengrajin Batu Mulia	Jumlah peserta pelatihan pengrajin batu mulia	20 orang	20 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	Kab. Gunung Mas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
37	Mengikuti Pameran Dekranasda (Indonesia Jewerly Fair)	Meningkatnya promosi produk unggulan binaan Dekranasda Kalteng	1 kali	1 kali	80.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	6 kali	490.000.000	Luar daerah
38	Pendataan Kerajinan Bahan Bangunan di Kab./Kota	Tersedianya data pengrajin se Kalimantan Tengah guna memudahkan pembinaan	60 IKM	60 IKM	60.000.000	60 IKM	50.000.000	60 IKM	52.500.000	60 IKM	55.125.000	60 IKM	57.881.250	60 IKM	60.775.313	360 IKM	336.281.563	Kab. / kota
39	Pelatihan Pengolahan Batu Alam	Jumlah peserta pelatihan pengolahan batu alam	20 orang	20 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	kab. Murung Raya
40	Pelatihan Diversifikasi Kerajinan Dari Tanah Liat	Jumlah peserta pelatihan diver-sifikasi kerajinan dari tanah liat	20 orang	20 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	Kab. Barito Timur
41	Magang Desain Furniture Rotan	Jumlah peserta Magang Desain Furniture Rotan	5 orang	5 orang	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	85.000.000	Luar daerah
42	Pelatihan Pembuatan Batako	Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Batako	20 orang	20 orang	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	Kab. Kapuas
43	Mengikuti Pameran INDOCRAFT di Jakarta (Dekranasda)	Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan pameran Indocraft	1 kali	1 kali	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	80.000.000	Jakarta
44	Pelatihan keterampilan bagi Industri Kecil di Lokasi PM2L	Terlatihnya 150 orangpengrajin di 10 lokasi PM2L	150 orang	150 orang	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 orang	350.000.000	Kab/Kota

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	Sosialisasi Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak kepada Pelaku Usaha IKM	Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 30 orang	30 orang	30 orang	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	45.000.000	Palangka Raya
46	Pelatihan Bordir Kain Bagi IKM Sandang	Jumlah peserta pelatihan bordir kain bagi IKM sandang	-	-	-	-	-	10 orang	60.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	87.500.000	40 orang	302.500.000	Palangka Raya
47	Pelatihan Teknik Pembuatan Perabotan rumah Tangga dari Aluminium	Jumlah peserta pelatihan teknik pembuatan perabotan aluminium	-	-	-	-	-	15 orang	60.000.000	15 orang	85.000.000	15 orang	85.000.000	15 orang	85.000.000	60 orang	315.000.000	Palangka Raya (2017), Kapuas (2018), Kotim (2019), Barut (2020), Bartim (2021)
48	Mengikuti Pameran Dalam Rangka HUT Dekranasda	Jumlah dokumen kegiatan pameran dalam rangka HUT Dekranasda	-	-	-	-	-	1 dok	75.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	85.000.000	4 dok	320.000.000	Jakarta
49	Pelatihan Diversifikasi Anyaman Purun	Jumlah peserta pelatihan diversifikasi anyaman pengrajin anyaman purun	-	-	-	-	-	20 orang	80.000.000	20 orang	85.000.000	20 orang	90.000.000	20 orang	90.000.000	20 orang	345.000.000	Kapuas
50	Fasilitasi Pendaftaran Merk/HKI bagi IKM	Terlindungi hak merk produk IKM	-	-	-	28 IKM	30.000.000	28 IKM	35.000.000	28 IKM	40.000.000	28 IKM	42.000.000	28 IKM	43.000.000	140 IKM	190.000.000	Palangka Raya
51	Fasilitasi Sertifikasi Halal	Tersedianya dokumen fasilitasi sertifikasi halal	-	-	-	10 IKM	50.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	10 IKM	80.000.000	50 IKM	370.000.000	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	Pelatihan Teknik Produksi Olahan Hasil Agro berstandarisasi GMP	Jumlah peserta pelatihan teknik produksi olahan hasil agro berstandarisasi GMP	-	-	-	-	-	10 orang	70.000.000	10 orang	75.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	80.000.000	10 orang	305.000.000	Gunung Mas
53	Fasilitasi keikutsertaan IKM dalam Pameran	Jumlah dokumen keikutsertaan IKM dalam pameran	-	-	-	-	-	1 dok	60.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	85.000.000	1 dok	25.000.000	Palangka Raya
54	Lomba Desain Kemasan Kalimantan Tengah	Terlaksananya lomba desain kemasan Kalimantan Tengah	-	-	-	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	80.000.000	5 Kegiatan	350.000.000	Palangka Raya
55	Penambahan Daya Listrik Kantor UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Bertambahnya daya listrik UPT	-	-	-	-	-	1 tahun	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1 tahun	50.000.000	Palangka Raya
56	Rapat Koordinasi Bidang Industri Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha IKM yang mengikuti Rakor IKM	-	-	-	-	-	30 orang	100.000.000	30 orang	105.000.000	30 orang	110.250.000	30 orang	115.762.500	150 orang	431.012.500	Palangka Raya
57	Lomba Ikon Produk Makanan Khas Kalteng	Terlaksananya lomba ikon makanan khas kalteng	-	-	-	1 Kegiatan	80.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	1 Kegiatan	85.000.000	5 Kegiatan	420.000.000	Palangka Raya
58	Sosialisasi/promosi pelayanan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Meningkatnya pelayanan publik di bidang kemasan	-	-	-	-	-	1 tahun	85.000.000	1 tahun	85.000.000	1 tahun	85.000.000	-	-	3 tahun	255.000.000	Dalam dan Luar Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	Peningkatan kemampuan operator produksi UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Meningkatnya keahlian operator produksi	-	-	-	-	-	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	80.000.000	4 tahun	320.000.000	Luar Daerah
60	Peningkatan Kemampuan Desain Kemasan bagi Desainer UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Meningkatnya kemampuan desain kemasan	-	-	-	-	-	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	4 tahun	200.000.000	Luar Daerah
61	Pengadaan Mesin dan Peralatan keperluan produksi makanan,minuman dan kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Tersedianya mesin dan peralatan keperluan produksi makanan, minuman dan kemasan UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	-	-	-	-	-	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	4 paket	400.000.000	Palangka Raya
62	Bantuan Kemasan bagi IKM Kalimantan Tengah	Meningkatnya kualitas kemasan dan daya saing produk IKM	-	-	-	-	-	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	4 paket	300.000.000	Kabupaten/Kota
63	Magang Produk Olahan Agro bagi IKM Pangan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengolahan hasil agro	-	-	-	-	-	5 orang	70.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	75.000.000	20 orang	295.000.000	Luar Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	Fasilitasi Mesin Jahit dan Mesin Obras	Tersedianya fasilitas mesin jahit dan mesin obras	-	-	-	-	-	1 paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	100.000.000	Kabupaten Kapuas
65	Fasilitasi Mesin Pengolahan Singkong	Tersedianya fasilitas mesin pengolahan singkong	-	-	-	-	-	1 paket	70.000.000	-	-	-	-	-	-	1 paket	70.000.000	Palangka Raya
66	Pelatihan Pengolahan Pangan berbasis Durian	Jumlah peserta pelatihan pengolahan pangan berbasis durian	-	-	-	-	-	20 orang	80.000.000	-	-	-	-	-	-	20 orang	80.000.000	Kabupaten Murung Raya
67	Promosi dan kerjasama pada Industri Makanan dan Minuman (pameran)	Meningkatnya daya saing industri makanan dan minuman	-	-	-	-	-	1 tahun	75.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	85.000.000	1 tahun	85.000.000	4 tahun	325.000.000	Luar Daerah
68	Standarisasi pada industri makanan dan minuman (SNI wajib)	Meningkatnya daya saing industri makanan dan minuman	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	75.000.000	3 tahun	225.000.000	Palangka Raya
69	Pelatihan Anyaman Rotan Tingkat Ahli	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengrajin rotan	-	-	-	-	-	20 orang	84.000.000	20 orang	88.200.000	20 orang	92.610.000	20 orang	97.240.500	80 orang	362.050.500	Palangka Raya
70	Pelatihan Teknik Pembuatan meubelair rotan	Meningkatnya keterampilan teknik pembuatan meubelair rotan	-	-	-	-	-	60 orang	252.000.000	60 orang	264.600.000	60 orang	277.830.000	60 orang	291.721.500	240 orang	1.086.151.500	Murung Raya, Seruyan, gumas
71	Magang anyaman rotan	Meningkatnya wawasan pengrajin rotan kalteng	-	-	-	-	-	6 orang	89.250.000	6 orang	93.712.500	6 orang	98.398.125	6 orang	103.318.031	24 orang	384.678.656	Luar Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
72	Pelatihan Kerajinan keset kaki dari sabut kelapa	Meningkatnya keterampilan pengrajin dari sabut kelapa	-	-	-	-	-	20 orang	80.000.000	20 orang	85.000.000	20 orang	85.000.000	20 orang	90.000.000	80 orang	340.000.000	Seruyan
73	Magang desain Furniture rotan	Meningkatnya wawasan pengrajin Furniture rotan kalteng	-	-	-	-	-	5 orang	90.000.000	5 orang	90.000.000	5 orang	95.000.000	5 orang	100.000.000	20 orang	375.000.000	Luar daerah
74	Pelatihan kerajinan dari tempurung kelapa	Meningkatnya keterampilan pengrajin tempurung kelapa	-	-	-	-	-	15 orang	80.000.000	15 orang	80.000.000	15 orang	85.000.000	15 orang	90.000.000	60 orang	335.000.000	Seruyan, Kotim
75	Pelatihan diversifikasi produk mebel dari bambu	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan pengrajin mebel dari bambu	-	-	-	-	-	20 orang	84.000.000	20 orang	88.200.000	20 orang	92.610.000	20 orang	97.240.500	80 orang	362.050.500	Murung Raya
76	Pelatihan kerajinan dari limbah kulit jagung	Meningkatnya keterampilan pengrajin limbah kulit jagung	-	-	-	-	-	20 orang	75.000.000	20 orang	75.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	85.000.000	80 orang	315.000.000	Murung Raya
77	Magang kerajinan dari tempurung kelapa	Meningkatnya wawasan pengrajin tempurung kelapa	-	-	-	-	-	5 orang	90.000.000	5 orang	95.000.000	5 orang	95.000.000	5 orang	100.000.000	20 orang	380.000.000	Luar daerah
78	Magang kerajinan diversifikasi produk mebel dari bambu	Meningkatnya wawasan dan keterampilan teknik pengrajin mebel dari bambu	-	-	-	-	-	5 orang	90.000.000	5 orang	95.000.000	5 orang	95.000.000	5 orang	100.000.000	20 orang	380.000.000	Luar daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79	Pelatihan kerajinan produk unggulan di desa tertinggal	Meningkatnya keterampilan pengrajin produk unggulan di desa tertinggal	-	-	-	-	-	80 orang	462.000.000	80 orang	485.100.000	80 orang	509.355.000	80 orang	534.822.750	320 orang	1.991.277.750	4 kali (Seruyan 2 desa = Desa Hanau & Desa Bangun Harja), (Sukamara 2 desa = Desa Lunci & Desa Padang Panjang)
80	Mengikuti Pameran kerajinan khas daerah	Meningkatnya promosi dan pengenalan produk khas daerah kalteng	-	-	-	-	-	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	110.000.000	1 dok	115.000.000	1 dok	425.000.000	Luar daerah
81	Magang Pembuatan Mesin Peralatan Tepat Guna Pasca Panen Hasil Pertanian	Meningkatnya kemampuan peserta magang dalam pembuatan mesin alsintan	-	-	-	-	-	5 orang	125.000.000	-	-	5 orang	135.000.000	-	-	5 orang	260.000.000	Luar daerah
82	Pelatihan pengemasan bagi IKM Pangan	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang standar kemasan makanan yang baik dan benar	-	-	-	15 orang	50.000.000	15 orang	52.500.000	15 orang	55.125.000	15 orang	57.881.250	15 orang	60.775.313	75 orang	276.281.563	Kab/Kota
83	Pengadaan bahan baku produksi kemasan UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Tersedianya kemasan bagi IKM	-	-	-	1 Tahun	200.000.000	1 Tahun	210.000.000	1 Tahun	220.500.000	1 Tahun	231.525.000	1 Tahun	243.101.250	5 Tahun	1.105.126.250	Palangka Raya
84	Pemeliharaan mesin dan pembelian sparepart/ suku cadang mesin UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov. Kalteng	Meningkatnya kinerja mesin operasional	-	-	-	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	131.250.000	1 Tahun	137.812.500	1 Tahun	144.703.125	1 Tahun	151.938.281	5 Tahun	690.703.906	Palangka Raya

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	Magang Peningkatan desain Produk anyaman rotan	meningkatkan ketrampilan dan wawasan pengrajin anyaman rotan kalteng	-	-	-	5 orang	50.000.000	5 orang	52.500.000	5 orang	55.125.000	5 orang	57.881.250	5 orang	60.775.313	15 orang	276.281.563	Yogyakarta
86	Pengadaan Mesin Jahit	Tersedianya peralatan mesin jahit	-	-	-	30 buah	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 buah	150.000.000	Kab/Kota
87	Pelatihan ketrampilan menjahit	Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan penjahit	-	-	-	30 orang	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	100.000.000	Kab/Kota
88	Pengadaan mesin penggiling daging dan pencetak pentol	Tersedianya peralatan mesin penggiling daging dan pencetak pentol	-	-	-	10 Paket	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Paket	150.000.000	Kab/Kota
89	Pengadaan mesin pembuatan kue kering	Tersedianya mesin pembuatan kue kering	-	-	-	20 Paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Paket	100.000.000	Kab/Kota
90	Pembangunan Gedung UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Disperindag Prov. Kalteng	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Gedung UPT.	-	-	-	-	-	1 gedung	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1 gedung	100.000.000	Palangka Raya

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan , maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2015	Target Capaian Tiap Tahun						Target Kinerja Akhir RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6,49 %	7,4 %	7,5 %	8,00 %	8,25 %	8,50 %	8,75 %	8,75 %
2.	Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri Pengolahan	15,18 %	15,34 %	16,5 %	16,75 %	17,00 %	17,25 %	17,50 %	17,50 %
3.	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	8,27 %	6,68 %	6,70 %	6,85 %	7,00 %	7,15 %	7,30 %	7,30 %
4.	Persentase Kontribusi PDRB dari sektor Industri	10,95 %	10,90 %	11,70 %	11,75 %	11,80 %	11,85 %	11,90 %	11,90 %
5.	Nilai ekspor bersih perdagangan Kalteng	US \$ 991,72 Juta	US \$ 900,68 Juta	US \$ 900 Juta	US \$ 950 Juta	US \$ 975 Juta	US \$ 1.000 Juta	US \$ 1.050 Juta	US \$ 950 Juta
6.	Prosentase Pertumbuhan ekspor non migas	-3,09 %	-9,06 %	1,00 %	1,00 %	1,05 %	1,10 %	1,15 %	1,15 %
7.	Nilai inflasi Kalteng yang terkendali	4,20 %	2,11 %	± 3,2 %	± 3,5 %	± 3,5 %	± 3,5 %	± 3,5 %	± 3,5 %
8.	Persentase pengaduan konsumen terkait barang dan jasa yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Persentase Peningkatan pengujian komoditi / produk mutu ekspor	0,71 %	5,56 %	10,00 %	10,15 %	10,25 %	10,35 %	10,50 %	10,50 %

Kesimpulan

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra dan penerjemahan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 di bidang perdagangan dan perindustrian. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Dagperin dalam pelaksanaan pembangunan Kalimantan Tengah selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Dagperin Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Dagperin dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2016- 2021.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Dagperin Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Dinas Dagperin Prov. Kalteng untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan SKPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat KalimantanTengah.